

STATISTIK PEMUDA PROVINSI MALUKU UTARA 2010

Hasil Sensus Penduduk 2010



STATISTIK PEMUDA PROVINSI MALUKU UTARA 2010

ISSN: 2086-1028

No. Publikasi/Publication Number: 04220.1132

Katalog BPS/BPS Catalogue: 4103008.82

Ukuran Buku/Book Size: 28 cm x 21 cm

Naskah/Manuscript :

Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Subdirectorate of Education and Social Welfare Statistics

Gambar Kulit/Cover Design:

Sub Direktorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Sub Directorate of Statistical Compilation and Publication

Diterbitkan oleh/Published by:

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

BPS - Statistics Indonesia

Dicetak oleh/Printed by:

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

May be cited with reference to the source

<http://www.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Data hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010) mengandung banyak informasi yang relevan dan perlu bagi bangsa Indonesia maupun dunia internasional. Bahkan dunia ilmu pengetahuan akan berkembang pesat karena data dan informasi statistik ini akan menjadi temuan-temuan baru. Publikasi Statistik Pemuda Provinsi Maluku Utara 2010 merupakan salah satu publikasi dengan sumber data hasil SP2010.

Publikasi Statistik Pemuda Provinsi Maluku Utara 2010 bertujuan untuk memberikan gambaran rinci pemuda di Provinsi Maluku Utara dilihat dari sisi kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesulitan fungsional. Publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu rujukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan, khususnya bidang kepemudaan.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan. Kritik dan saran membangun untuk perbaikan publikasi serupa di masa datang sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2011
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik RI



Dr. Suryamin, M.Sc

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penulisan	3
1.3. Sistematika Penulisan	4
BAB II METODOLOGI	7
2.1. Sumber Data	7
2.2. Ruang Lingkup	8
2.2.1. Cakupan Wilayah	8
2.2.2. Metode Pengumpulan Data	8
2.3. Konsep dan Definisi	9
2.4. Keterbatasan Data	16
2.5. Metode Analisis	16
BAB III PROFIL DEMOGRAFI PEMUDA	19
3.1. Jumlah dan Distribusi Pemuda	20
3.2. Komposisi Pemuda menurut Jenis Kelamin	21
3.3. Komposisi Pemuda menurut Tipe Daerah	22
3.4. Komposisi Pemuda menurut Kelompok Umur	23
3.5. Komposisi Pemuda menurut Status Perkawinan	24
3.6. Pemuda menurut Status dalam Rumah Tangga	26
3.7. Fertilitas Pemuda	28

BAB IV	PENDIDIKAN PEMUDA	31
	4.1. Kemampuan Berbahasa Indonesia Pemuda	32
	4.2. Partisipasi Sekolah Pemuda	34
	4.3. Angka Buta Aksara Pemuda	37
	4.4. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pemuda	40
BAB V	KETENAGAKERJAAN PEMUDA	45
	5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	46
	5.2. Pemuda Bekerja menurut Lapangan Usaha	50
	5.3. Pemuda Bekerja menurut Status Pekerjaan	53
	5.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda	56
BAB VI	KESULITAN FUNGSIONAL PEMUDA	61
	6.1. Gambaran Kesulitan Fungsional Pemuda menurut Tipe Daerah	62
	6.2. Gambaran Kesulitan Fungsional Pemuda menurut Jenis Kelamin	64
LAMPIRAN KUESIONER		69

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
3.1	Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Kelompok Umur (Tahun) dan Tipe Daerah, 2010	24
3.2	Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, 2010	25
3.3	Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Jenis Kelamin, Tipe Daerah dan Status Perkawinan, 2010	26
3.4	Persentase Pemuda Kepala Rumah Tangga di Provinsi Maluku Utara menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2010	27
4.1	Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Tipe Daerah dan Partisipasi Sekolah, 2010	36
4.2	Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2010	41
5.1	TPAK Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2010	47
5.2	Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara yang Bekerja menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2010	49
5.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2010	57

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
3.1	Jumlah dan Persentase Penduduk di Provinsi Maluku Utara menurut Kelompok Umur (Tahun) dan Tipe Daerah, 2010	21
3.2	Jumlah Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin serta Rasio Jenis Kelamin Pemuda, 2010	22
3.3	Persentase Pemuda terhadap Penduduk di Provinsi Maluku Utara menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2010	23
3.4	Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Kelompok Umur (Tahun), Status dalam Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, 2010	27
3.5	Persentase Pemuda Perempuan di Provinsi Maluku Utara yang Pernah Kawin menurut Tipe Daerah, Kelompok Umur (Tahun) dan Jumlah Anak yang Dilahirkan, 2010	28
4.1	Jumlah dan Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kemampuan Berbahasa Indonesia, 2010	32
4.2	Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara yang Mampu Berbahasa Indonesia menurut Kelompok Umur (Tahun), Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2010	33
4.3	Jumlah dan Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, 2010	35
4.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Kelompok Umur (Tahun), Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2010	37

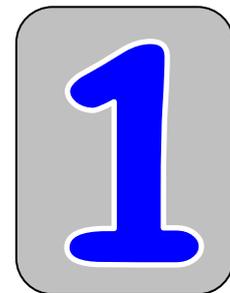
Tabel		Halaman
4.5	Jumlah dan Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2010	38
4.6	Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara yang Buta Aksara menurut Kelompok Umur (Tahun), Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2010	39
4.7	Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Tipe daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2010	40
5.1	TPAK Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur (Tahun), 2010	48
5.2	Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara yang Bekerja menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2010	50
5.3	Jumlah dan Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara yang Bekerja menurut Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, 2010	51
5.4	Jumlah dan Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara yang Bekerja menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, 2010	53
5.5	Jumlah dan Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Tipe Daerah, 2010	54
5.6	Jumlah dan Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2010	55
5.7	Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2010	56

Tabel		Halaman
5.8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Tipe daerah, 2010	58
6.1	Jumlah Pemuda di Provinsi Maluku Utara yang Mempunyai Kesulitan Fungsional menurut Tipe Daerah, Jenis Kesulitan dan Tingkat Kesulitan, 2010	63
6.2	Jumlah Pemuda di Provinsi Maluku Utara yang Mempunyai Kesulitan Fungsional menurut Jenis Kelamin, Jenis Kesulitan dan Tingkat Kesulitan, 2010	65

<http://www.bps.go.id>

PENDAHULUAN

<http://www.wis.go.id>



Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diantaranya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 tersebut, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, maka visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah: Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Bangsa **mandiri** adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada

kemampuan dan kekuatan sendiri. Bangsa dikatakan makin **maju** apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. **Adil** berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. **Makmur** dimaksudkan terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa lain di dunia.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 1 menyatakan bahwa pemuda adalah penduduk berumur 16 hingga 30 tahun. Dari segi demografi, kelompok umur 16-30 tahun tergolong usia produktif, dimana beban ketergantungan penduduk tidak produktif (dibawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) menjadi tanggungan usia produktif, artinya pemuda memiliki beban tanggungan. Pemuda merupakan penentu masa depan bangsa. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa.

Dalam kategori ekonomi, pemuda merupakan aset ekonomi dalam pembangunan. Posisi pemuda, selain sebagai tenaga kerja, juga merupakan penentu kondisi perekonomian suatu negara. Di masa depan, tantangan kepemudaan dalam bidang ekonomi adalah persoalan produktivitas termasuk daya saing dan kemampuan kewirausahaan. Pemuda harus semakin kreatif, inovatif, produktif, dan memiliki kapasitas lebih agar berdaya saing baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemberdayaan dan peningkatan peran harus terus dilakukan secara optimal.

Pemuda berkualitas menjadi target pembangunan. Visi dan tantangan tersebut di atas menjadi tolok ukur bagi peningkatan kualitas pemuda dan pembangunan kepemudaan Indonesia. Peningkatan partisipasi dan peran pemuda dalam pembangunan harus didukung oleh ketersediaan anggaran dan sarana-prasarana kepemudaan, penghargaan kepemudaan, serta optimalisasi manajemen organisasi kepemudaan dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan kepeloporan pemuda.

Menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai wadah yang bertanggungjawab dalam pemberdayaan dan pengembangan pemuda telah menyusun Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yaitu “Mewujudkan Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berdaya Saing”, artinya memiliki kemampuan berkompetisi di era globalisasi.

Sasaran kepemudaan diantaranya di bidang ketenagakerjaan menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga 5-6 persen pada akhir 2014, dan di bidang pendidikan diantaranya rata-rata lama sekolah sekurang-kurangnya 8,25 tahun.

Untuk mencapai visi dan menjawab tantangan masa depan pembangunan kepemudaan harus didukung oleh tersedianya data yang akurat dan mutakhir sebagai bahan perencanaan, target/sasaran pembangunan, pengambilan kebijakan dan evaluasi pembangunan khususnya pemuda. Publikasi Pemuda Provinsi Maluku Utara 2010 menyajikan gambaran makro mengenai kondisi dan situasi pemuda di Provinsi Maluku Utara.

1.2 Tujuan Penulisan

Penyusunan publikasi Statistik Pemuda Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 ini untuk memperoleh gambaran rinci pemuda di Provinsi Maluku Utara. Kondisi pemuda dalam publikasi ini dilihat dari sisi kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesulitan fungsional.

Indikator yang dicakup dalam aspek kependudukan meliputi jumlah pemuda, rasio jenis kelamin, komposisi pemuda menurut status perkawinan dan status pemuda dalam rumah tangga serta fertilitas pemuda. Aspek pendidikan digambarkan oleh kemampuan berbahasa Indonesia, partisipasi sekolah, angka buta aksara, dan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Aspek ketenagakerjaan digambarkan oleh tingkat partisipasi angkatan kerja, pemuda bekerja menurut lapangan usaha, dan status pekerjaan, serta tingkat pengangguran. Aspek kesulitan fungsional digambarkan oleh jenis kesulitan fungsional yang dialami pemuda.

Publikasi ini juga menggambarkan kesenjangan dalam aspek potensi, kualitas, dan dinamika pemuda dilihat menurut wilayah (daerah perkotaan dan perdesaan) serta jenis kelamin.

1.3 Sistematika Penulisan

Publikasi Statistik Pemuda Provinsi Maluku Utara 2010 secara sistematis disajikan dalam enam bagian. Uraian rinci disajikan dalam bab-bab sesuai tema bahasan dari publikasi. Bagian pertama (Bab I) menyajikan latar belakang penyusunan publikasi, tujuan dan sistematika penyajian. Metodologi mencakup sumber data, ruang lingkup, metode pengumpulan data, petugas lapangan, serta konsep dan definisi disajikan pada bagian kedua (Bab II). Bagian berikutnya secara berturut-turut menyajikan gambaran pemuda dari aspek kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesulitan fungsional.

METODOLOGI

<http://www.bps.go.id>



Metodologi

2.1 Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam publikasi Statistik Pemuda 2010 adalah data hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 (SP2010). Data yang dihasilkan dari SP2010 dapat memberikan gambaran secara aktual mengenai kondisi demografi, perumahan, pendidikan, dan ketenagakerjaan hingga wilayah administratif yang paling kecil (desa/kelurahan). Berkaitan dengan publikasi ini, berdasarkan data hasil SP2010 diperoleh gambaran makro mengenai kondisi dan potensi pemuda dari sisi demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesulitan fungsional.

Secara konstitusional, Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab menyediakan statistik dasar melalui kegiatan Sensus Penduduk (SP), Sensus Pertanian (ST), dan Sensus Ekonomi (SE) yang masing-masing dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk di Indonesia telah dilakukan sebanyak enam kali, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan yang terakhir pada bulan Mei 2010.

2.2. Ruang Lingkup

2.2.1. Cakupan Wilayah

Pelaksanaan SP2010 dilakukan terhadap seluruh penduduk warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang tinggal dalam wilayah teritorial Indonesia, baik yang bertempat tinggal tetap maupun yang tidak tetap. Penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap antara lain tuna wisma, pengungsi, awak kapal berbendera Indonesia, suku terasing, dan penghuni perahu/rumah apung. Sedangkan anggota korps diplomatik negara lain beserta anggota rumahtangganya, meskipun tinggal dan menetap di wilayah teritorial Indonesia tidak dicakup dalam pencacahan SP2010. Sebaliknya anggota korps diplomatik RI beserta anggota rumahtangganya yang berada di luar negeri akan dicakup dalam SP2010.

Pencacahan SP2010 dilakukan serentak pada “Bulan Sensus” mulai tanggal 1 Mei 2010 sampai dengan 31 Mei 2010.

2.2.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam SP2010, pencacahan penduduk menggunakan konsep “*de jure*” atau konsep “dimana seseorang biasanya menetap/bertempat tinggal” (*usual residence*) dan konsep “*de facto*” atau konsep “dimana seseorang berada pada saat pencacahan”. Untuk penduduk yang bertempat tinggal tetap, dicacah dimana mereka biasanya bertempat tinggal. Penduduk yang sedang bepergian 6 bulan atau lebih, atau yang telah berada pada suatu tempat tinggal selama 6 bulan atau lebih, dicacah dimana mereka tinggal pada saat pencacahan. Penduduk yang menempati rumah kontrak/sewa (tahunan/bulanan) dianggap sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap.

Pelaksanaan pencacahan penduduk dalam SP2010 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penduduk yang bertempat tinggal tetap termasuk tempat tinggal biasa, apartemen, rumah susun dan perumahan elit akan dicacah dengan daftar L1 dan daftar C1 yang dapat dilihat pada lampiran. Daftar L1 berisi keterangan tentang jenis bangunan, nama kepala rumah tangga (KRT), dan jumlah anggota rumah tangga (ART) dibedakan menurut jenis kelamin.

Daftar C1 berisi keterangan nama ART, hubungan dengan KRT, jenis kelamin, umur, agama, kecacatan (*functional disability*), suku bangsa, bahasa, migrasi, pendidikan, status perkawinan, ketenagakerjaan, fertilitas, mortalitas, dan fasilitas perumahan.

2. Penduduk yang bertempat tinggal tetap di wilayah lain, mencakup masyarakat terpencil, penghuni rumah perahu, dan diplomat beserta anggota rumah tangganya di luar negeri, akan dicacah dengan daftar C2 yang dapat dilihat pada lampiran. Daftar C2 berisi keterangan nama ART, hubungan dengan KRT, jenis kelamin, umur, agama, migrasi, ijazah, status perkawinan, ketenagakerjaan, luas lantai rumah, dan fasilitas penerangan perumahan.
3. Penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap mencakup tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia, suku terasing, penghuni penjara, penghuni barak militer, pengungsi di tenda penampungan dicacah dengan daftar L2 yang dapat dilihat pada lampiran. Daftar L2 berisi keterangan tentang mengenai nama ART, jenis kelamin, ijazah, dan tempat lahir (provinsi dan kabupaten/kota).

2.3 Konsep dan Definisi

Tipe Daerah menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas perkotaan.

Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Rumah Tangga Khusus adalah orang yang tinggal di asrama seperti asrama perawat, asrama mahasiswa dan asrama TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) berjumlah 10 orang atau lebih.

Anggota Rumah Tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).

Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap **dianggap** sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

Pemuda adalah penduduk berumur 16-30 tahun.

Rumah Tangga Pemuda adalah rumah tangga yang minimal salah satu anggota rumah tangganya berumur 16-30 tahun.

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan.

Kawin adalah mempunyai istri (bagi pria) atau suami (bagi wanita) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun tinggal terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.

Cerai hidup adalah berpisah sebagai suami/istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari

pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi mengaku pernah hamil, dianggap sebagai cerai hidup.

Cerai mati adalah ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.

Anak lahir hidup adalah anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti jantung berdenyut, bernafas, menangis, dan tanda-tanda hidup lainnya walaupun mungkin hanya beberapa saat saja.

Anak masih hidup adalah semua anak yang dilahirkan hidup oleh seorang ibu yang pada saat pencacahan masih hidup, baik yang tinggal bersama-sama maupun yang tinggal di tempat lain.

Kemampuan berbahasa Indonesia adalah mengerti apa yang diucapkan orang (didengar oleh ART) dan dapat mengucapkan kata-kata yang dimengerti orang lain dalam bahasa Indonesia.

Angka Partisipasi Sekolah adalah nilai perbandingan (dalam persen) banyaknya penduduk yang bersekolah di jenjang pendidikan formal terhadap total penduduk, menurut batasan umur sekolah pada setiap jenjang pendidikan.

Bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/ sederajat dan SMP/ sederajat, pendidikan menengah yaitu SMA/ sederajat dan pendidikan tinggi yaitu PT/ sederajat) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Kementerian Agama (Kemenag), instansi lainnya, termasuk mahasiswa yang sedang cuti.

Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat dan PT.

Tidak/Belum Pernah Sekolah adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Tamat Sekolah adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki dan ditamatkan oleh seseorang yang masih bersekolah.

Belum Tamat SD adalah pernah/sedang bersekolah di SD atau yang sederajat tetapi tidak/belum tamat.

SD meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.

SMP meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP kejuruan dan sederajat.

SM meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat.

Diploma/Sarjana adalah program DI/DII/DIII atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda, program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi, program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

Buta Aksara adalah tidak bisa membaca dan menulis kalimat sederhana dengan suatu huruf/aksara, termasuk huruf Braille. Orang cacat yang pernah dapat membaca dan menulis digolongkan tidak buta aksara.

Angkatan Kerja Pemuda adalah penduduk berumur 16 - 30 tahun yang selama seminggu sebelum pencacahan mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan.

Bukan Angkatan Kerja Pemuda adalah penduduk berumur 16 - 30 tahun yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Dapat juga berarti tidak melakukan

kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah, yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi).

Menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja.

Mencari Pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang sedang mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat ijin usaha, dsb.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK dihitung dengan rumus:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Namun untuk publikasi ini umur dibatasi **16-30 tahun**.

Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja.

Status Pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap, berusaha dibantu buruh tidak tetap, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas, pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.

Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda adalah persentase angkatan kerja pemuda yang tidak memiliki pekerjaan yang secara aktif mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha maupun yang bersedia bekerja. TPT dihitung dengan rumus:

$$\text{TPT Pemuda} = \frac{\text{Jumlah Pemuda yang Mencari Pekerjaan, Mempersiapkan Usaha, dan Bersedia Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja Pemuda (16-30 tahun)}} \times 100\%$$

Kesulitan Fungsional atau *functional difficulty* adalah ketidakmampuan seseorang melakukan aktivitas normal sehari-hari. Ada lima kesulitan fungsional yang dicakup dalam SP2010 yaitu (1) kesulitan melihat, (2) kesulitan mendengar, (3) kesulitan berjalan, (4) kesulitan mengingat, berkonsentrasi, atau berkomunikasi, dan (5) kesulitan mengurus diri sendiri. Kelima jenis kesulitan tersebut diukur tingkat kesulitannya yaitu (1) Tidak ada kesulitan, (2) Sedikit, atau (3) Parah.

Kesulitan melihat, meskipun pakai kacamata apabila dalam jarak minimal 30 cm dan dengan penerangan yang cukup tidak dapat melihat dengan jelas baik bentuk, ukuran dan warna. Walaupun orang itu menggunakan alat bantu (kacamata), ia tetap mengalami kesulitan melihat, maka orang tersebut dikategorikan mengalami kesulitan. Tetapi, kalau dengan bantuan kacamata ia dapat melihat normal, maka orang itu dikategorikan tidak mengalami gangguan.

Yang termasuk kesulitan/gangguan penglihatan adalah:

- (1) Buta Total: kondisi dimana dua mata tidak dapat melihat sama sekali;
- (2) Kurang penglihatan (*low vision*) adalah kondisi dimana dua mata tidak dapat menghitung jari-jari yang digerakkan pada jarak 1 meter di depannya walaupun memakai kacamata atau cukup cahaya;
- (3) Buta warna adalah kondisi dua mata responden tidak dapat membedakan warna.

Kesulitan Mendengar, meskipun memakai alat bantu pendengaran jika tidak dapat mendengar suara dengan jelas, membedakan sumber, volume dan kualitas suara sehingga tidak dapat merespon suara tersebut secara wajar. Seseorang yang menggunakan alat bantu sehingga dapat mendengar dengan normal, maka orang tersebut dikategorikan tidak mengalami kesulitan. Termasuk kategori ini adalah para penyandang cacat rungu/wicara.

Kesulitan berjalan atau naik tangga, bila tidak dapat berjalan dengan normal misalnya maju, mundur, ke samping, tidak stabil dan kesulitan untuk menaiki tangga. Seseorang yang harus menggunakan alat bantu untuk berjalan atau naik tangga dikategorikan mengalami kesulitan.

Kesulitan mengingat atau berkonsentrasi atau berkomunikasi dengan orang lain karena kondisi fisik atau mental, jika mengalami kesulitan dalam mengingat atau tidak dapat berkonsentrasi. Seseorang dikatakan mengalami kesulitan/gangguan berkomunikasi bila dalam berbicara berhadapan tanpa dihalangi sesuatu, seperti tembok, musik keras, sesuatu yang menutupi telinga, pembicaraannya tidak dapat dimengerti atau tidak dapat berbicara sama sekali karena gangguan fisik dan mental. Termasuk kategori ini adalah para penyandang cacat rungu/wicara dan autis.

Kesulitan mengurus diri sendiri, jika mengalami kesulitan dalam kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, berpakaian, ke toilet, dan lain-lain. Kesulitan makan maksudnya dalam hal makan sendiri (disuapi orang lain, menggunakan sendok, garpu untuk mengambil makanan atau minuman). Kesulitan membersihkan seluruh tubuh. Kesulitan berpakaian maksudnya dalam hal mengambil pakaian dari tempat penyimpanan, mengancingkan baju, mengikat simpul, dll. Kesulitan tangan maksudnya dalam hal mengambil/memegang barang (tangan lemah, jari kurang lengkap).

Seseorang dikatakan mengalami **kesulitan sedikit** bila ia mengalami kesulitan namun masih dapat melakukan hal tersebut.

Seseorang dikatakan mengalami **kesulitan parah** bila ia tidak dapat lagi melakukan aktivitas tersebut atau sangat sulit untuk melakukannya.

Sensus Penduduk hanya mengumpulkan data secara normatif dengan pengamatan, pengetahuan dan pengakuan anggota rumah tangga (ART).

2.4 Keterbatasan Data

1. Pengumpulan data kesulitan fungsional dalam SP2010 hanya dilakukan berdasarkan pengamatan, pengetahuan dan pengakuan responden, bukan berdasarkan pemeriksaan atau peralatan medis.
2. Pengumpulan data keaksaraan dalam SP2010 didasarkan pada *declaration* atau pernyataan/pengakuan responden, bukan pada uji/tes membaca dan menulis.
3. Dari seluruh variabel yang disajikan dalam publikasi ini, hanya variabel demografi dan pendidikan yang ditamatkan yang dicakup untuk seluruh penduduk, sedangkan variabel kesulitan fungsional, kemampuan berbahasa Indonesia, partisipasi sekolah, dan kemampuan membaca dan menulis tidak mencakup seluruh penduduk.

2.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam publikasi ini adalah analisis deskriptif dengan penyajian data dalam bentuk tabel ulasan sederhana dan visualisasi berupa gambar/grafik untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Analisis yang disajikan disertai dengan analisis diferensial untuk melihat perbedaan pola serta gambaran antar daerah perkotaan dan perdesaan serta jenis kelamin.

PROFIL DEMOGRAFI

<http://www.btk.go.id>



Profil Demografi Pemuda

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar. Penempatan penduduk sebagai titik sentral pembangunan menjadi sangat penting, karena selain sebagai sasaran dari pembangunan, penduduk juga sebagai pelaku pembangunan. Keberhasilan suatu pembangunan sangat bergantung pada penduduknya. Penduduk berkualitas akan menjadi potensi dalam pembangunan.

Salah satu dari potensi penduduk adalah generasi muda atau yang disebut dengan pemuda. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Pasal 1 ayat 1), yaitu mendefinisikan pemuda sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia **16 (enam belas)** sampai **30 (tiga puluh)** tahun. Pemuda merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) potensial yang mendukung keberhasilan pembangunan, bila

dilihat dari aspek kuantitas maupun produktivitas. Potensi tersebut dapat juga menjadi beban bila sebagian besar pemuda tidak terserap dalam proses pembangunan. Karenanya, perlu perencanaan program dan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan kualitas pemuda. Dengan demikian data kependudukan sangat diperlukan untuk setiap kegiatan perencanaan pembangunan.

Data dasar kependudukan yang banyak digunakan adalah data yang berkaitan dengan jumlah dan struktur penduduk. Data jumlah dan struktur penduduk pada perencanaan input pembangunan digunakan sebagai rujukan memperkirakan jumlah SDM atau tenaga kerja yang dapat diserap dalam kegiatan pembangunan, sedangkan pada perencanaan output pembangunan, data jumlah dan struktur penduduk digunakan untuk menentukan kelompok sasaran (*target groups*) pembangunan. Sejalan dengan itu, arah dan kebijakan pembangunan bidang kepemudaan baik sektoral maupun lintas sektoral perlu didukung oleh ketersediaan data dasar mengenai jumlah, distribusi dan struktur pemuda.

Uraian pada bagian ini diarahkan dalam rangka memperoleh gambaran pemuda di Provinsi Maluku Utara dilihat dari jumlah, distribusi dan struktur/komposisi pemuda. Pada bagian ini akan dilihat beberapa aspek demografis penting, yaitu jenis kelamin, umur, status perkawinan dan hubungan dengan kepala rumah tangga.

3.1 Jumlah dan Distribusi Pemuda

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional (*human capital*). Sebagai modal dasar pembangunan, penduduk tidak hanya sebagai sasaran pembangunan, tetapi juga sebagai pelaku pembangunan. Pemuda merupakan bagian dari penduduk usia produktif yang potensial bagi pembangunan, serta menempati posisi penting dan strategis, baik sebagai pelaku maupun generasi penerus untuk berkiprah di masa depan.

Tabel 3.1
Jumlah dan Persentase Penduduk di Provinsi Maluku Utara menurut Kelompok Umur (Tahun) dan Tipe Daerah, 2010

Kelompok Umur (Tahun)	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
< 13	74.781	26,59	251.299	33,20	326.080	31,41
13 -15	15.971	5,68	47.858	6,32	63.829	6,15
16 - 30	91.621	32,58	193.658	25,59	285.279	27,48
31 - 45	59.321	21,09	149.832	19,80	209.153	20,15
> 45	39.547	14,06	114.199	15,09	153.746	14,81
Jumlah	281.241	100,00	756.846	100,00	1.038.087	100,00

Berdasarkan hasil SP2010, jumlah pemuda di Maluku Utara sekitar 285.279 orang atau 27,48 persen dari jumlah penduduk Maluku Utara secara keseluruhan yang saat ini berjumlah 1.038.087 orang (Tabel 3.1). Berdasarkan kelompok umur, terlihat bahwa pemuda mempunyai persentase yang paling kecil jika dibandingkan dengan persentase penduduk usia di bawah 16 tahun (37,56 persen) dan penduduk di atas 30 tahun (34,96 persen).

3.2 Komposisi Pemuda menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi bukan merupakan jaminan keberhasilan pembangunan. Pemerintah berupaya menekan laju pertumbuhan penduduk melalui Program Keluarga Berencana yang dicanangkan di akhir tahun 1960-an, dengan tujuan mempercepat penurunan angka kelahiran untuk mengatasi masalah ledakan penduduk. Upaya tersebut telah menunjukkan keberhasilan, ditandai dengan turunnya angka ketergantungan penduduk usia muda, struktur keluarga (jumlah keluarga mengecil) dan kesempatan yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas anak.

Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya

kesejahteraan penduduk, jumlah pemuda pun ikut meningkat. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa jumlah pemuda laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda perempuan. Seperti yang terlihat pada Tabel 3.2, jumlah pemuda laki-laki sebesar 143.762 orang dan pemuda perempuan sebesar 141.517 orang. Rasio jenis kelamin pemuda pada tahun 2010 sebesar 101,59 yang berarti dalam 100 pemuda perempuan terdapat sekitar 101 sampai 102 pemuda laki-laki. Lebih tingginya jumlah pemuda laki-laki dibandingkan pemuda perempuan juga terjadi di daerah perdesaan. Di daerah perdesaan, jumlah pemuda laki-laki sebesar 97.377 orang dan pemuda perempuan sebesar 96.281 orang. Rasio jenis kelamin pemuda perdesaan tercatat sebesar 101,14. Begitu pula daerah perkotaan terjadi pola yang sama, dimana jumlah pemuda laki-laki lebih banyak dari jumlah pemuda perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,54.

Tabel 3.2
Jumlah Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin serta Rasio Jenis Kelamin Pemuda, 2010

Tipe Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin Pemuda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan (K)	46.385	45.236	91.621	102,54
Perdesaan (D)	97.377	96.281	193.658	101,14
K+D	143.762	141.517	285.279	101,59

3.3 Komposisi Pemuda menurut Tipe Daerah

Pola hidup antara penduduk perkotaan dan perdesaan berbeda. Pusat kota menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk untuk tinggal di perkotaan. Disamping tingkat kemajuan ekonomi, anggapan bahwa kota menjanjikan kehidupan yang lebih baik, tersedianya lapangan kerja yang lebih luas serta tersedianya fasilitas pendidikan maupun fasilitas-fasilitas lain yang lebih lengkap dibandingkan dengan di desa menyebabkan banyak penduduk pindah ke kota.

Tabel 3.3
Persentase Pemuda terhadap Penduduk di Provinsi Maluku Utara menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2010

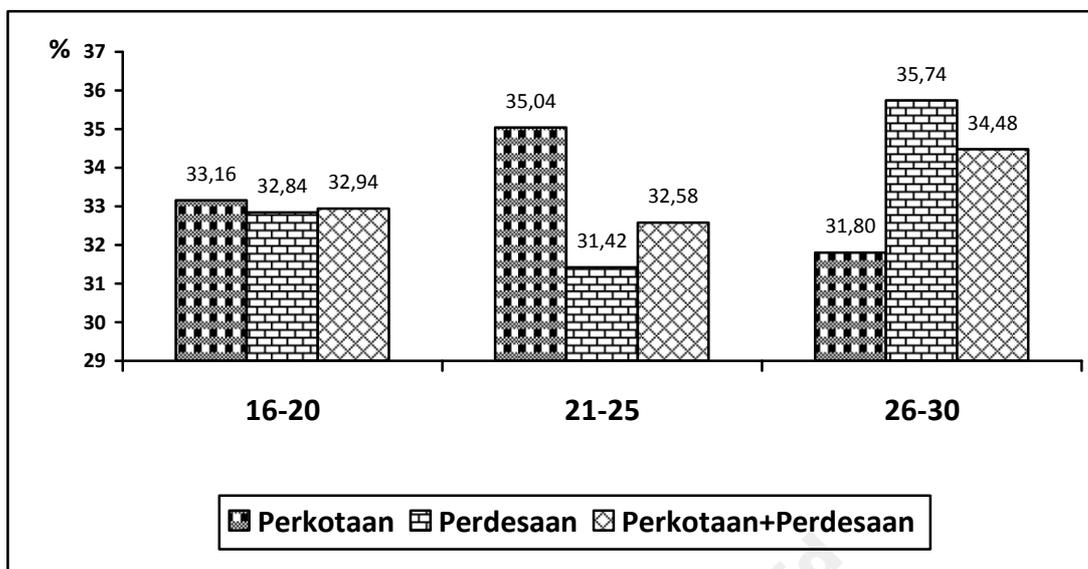
Tipe Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan (K)	32,47	32,69	32,58
Perdesaan (D)	25,06	26,14	25,59
K+D	27,05	27,93	27,48

Pada tahun 2010, persentase pemuda sebesar 27,48 persen dari jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara (Tabel 3.3). Menurut Tipe Daerah, persentase pemuda di perkotaan tercatat sebesar 32,58 persen dari jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan, dan di daerah perdesaan sekitar 25,59 persen. Berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa komposisi antara pemuda laki-laki dan perempuan relatif tidak berbeda. Dari keseluruhan penduduk perempuan, sekitar 27,93 persennya adalah pemuda perempuan. Sedangkan pemuda laki-laki tercatat sebesar 27,05 persen dari keseluruhan penduduk laki-laki.

3.4 Komposisi Pemuda menurut Kelompok Umur

Struktur umur pemuda pada tahun 2010 disajikan pada Gambar 3.1. Komponen terbesar pemuda terdapat pada kelompok umur 26-30 tahun dengan persentase sebesar 34,48 persen, diikuti pemuda pada kelompok umur 16-20 tahun dengan persentase sebesar 32,94 persen, dan kelompok umur 21-25 tahun sebesar 32,58 persen.

Gambar 3.1
Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Kelompok Umur (Tahun)
dan Tipe Daerah, 2010



Menurut tipe daerah, terlihat adanya perbedaan komposisi pemuda pada masing-masing kelompok umur. Di daerah perdesaan, komposisi terbesar adalah pemuda pada kelompok umur 26-30 tahun dengan persentase sebesar 35,74 persen, kemudian pada kelompok umur 16-20 tahun (32,84 persen), dan pemuda pada kelompok umur 21-25 tahun (31,42 persen). Sementara di daerah perkotaan pemuda pada kelompok umur 21-25 tahun merupakan persentase tertinggi sebesar 35,04 persen, diikuti kelompok umur 16-20 tahun dengan persentase sebesar 33,16 persen, dan pemuda kelompok umur 26-30 tahun dengan persentase sebesar 31,80 persen.

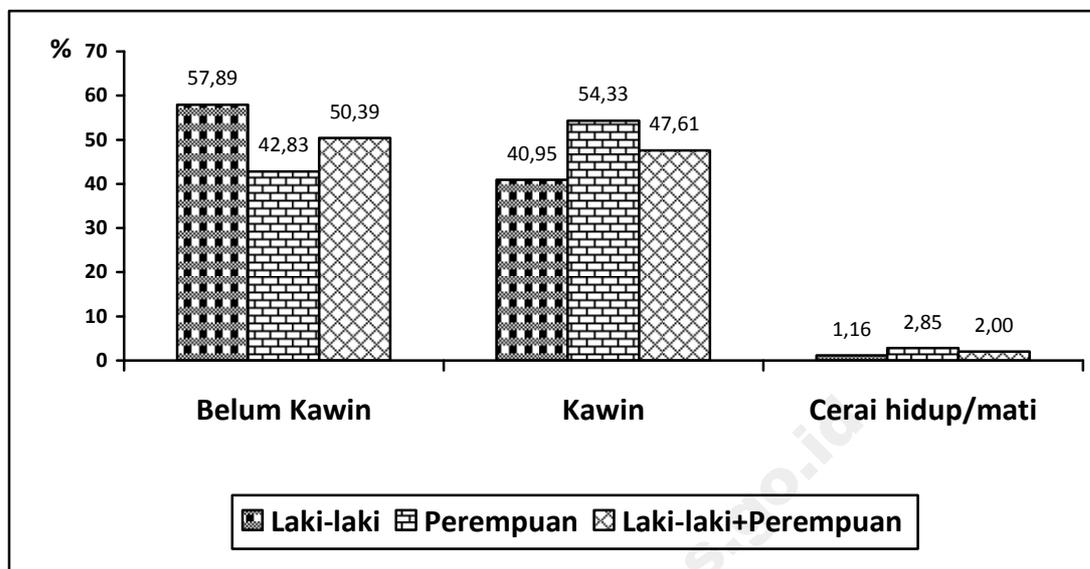
3.5 Komposisi Pemuda menurut Status Perkawinan

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kenyataannya masih terdapat perkawinan usia muda yang umumnya terjadi di daerah perdesaan terutama pada penduduk perempuan.

Hasil SP2010 menunjukkan bahwa sekitar 50,39 persen pemuda berstatus belum kawin, sebesar 47,61 persen berstatus kawin dan sisanya

adalah mereka yang berstatus cerai hidup/mati, yaitu sebesar 2,00 persen (Gambar 3.2).

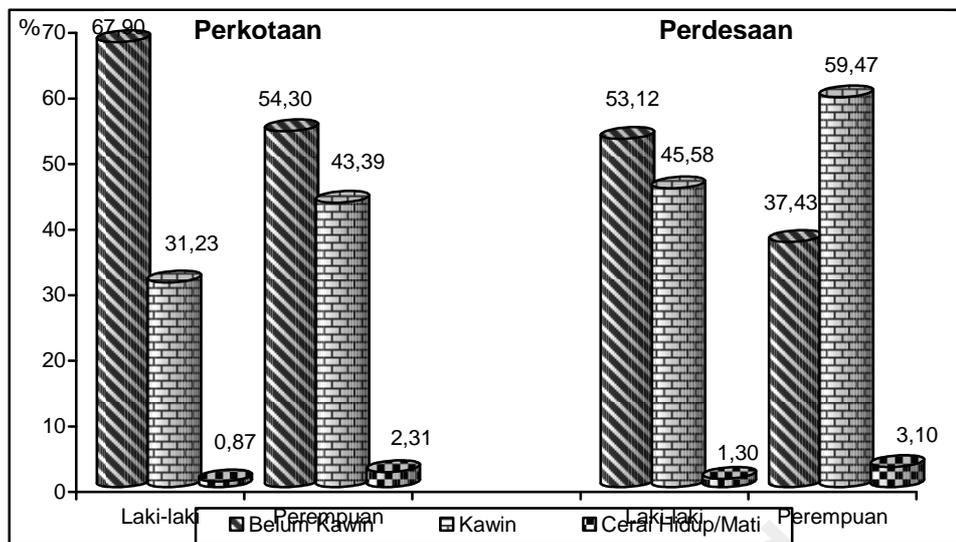
Gambar 3.2
Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, 2010



Berdasarkan Gambar 3.2 terlihat adanya perbedaan pola status perkawinan antara pemuda laki-laki dan perempuan. Persentase pemuda perempuan dengan status kawin lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda laki-laki (54,33 persen berbanding 40,95 persen). Selanjutnya, persentase pemuda laki-laki yang belum kawin (57,89 persen) lebih tinggi dibandingkan pemuda perempuan (42,83 persen). Perbedaan kedua angka ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa perempuan pada umumnya menikah di usia lebih muda dibandingkan dengan laki-laki.

Gambaran mengenai pemuda berdasarkan status perkawinan, tipe daerah dan jenis kelamin disajikan pada Gambar 3.3. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase pemuda laki-laki di daerah perkotaan yang berstatus kawin hanya sebesar 31,23 persen, sedangkan pemuda perempuan mencapai 43,39 persen. Di daerah perdesaan persentase pemuda laki-laki yang berstatus kawin sebesar 45,58 persen dan pemuda perempuan sebesar 59,47 persen.

Gambar 3.3
Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Jenis Kelamin, Tipe Daerah dan Status Perkawinan, 2010

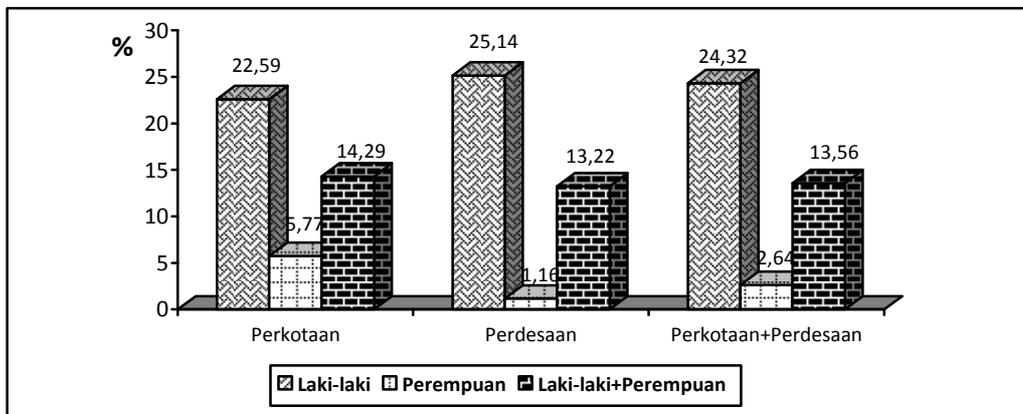


3.6 Pemuda Menurut Status dalam Rumah Tangga

Orang yang memimpin dan bertanggungjawab terhadap satu rumah tangga disebut sebagai kepala rumah tangga. Kedudukan kepala rumah tangga sangat penting dalam menentukan kelangsungan dan keberadaan rumah tangga. Selain harus bertanggung jawab secara ekonomis untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggotanya, kepala rumah tangga juga harus mengatur dan memimpin anggota rumah tangganya, serta berperan sebagai pengambil keputusan.

Peran kepala rumah tangga sebagai pengambil keputusan rumah tangga memiliki hak istimewa dan otoritas yang besar dalam rumah tangga. Laki-laki sebagai suami dan ayah merupakan figur sentral dalam keluarga. Kewibawaan, harga diri, dan status sosial ayah atau suami harus dijaga oleh anggota keluarga karena sangat menentukan status dan kedudukan keluarga dalam masyarakat (Kusujarti, dalam Abdullah, 1997).

Gambar 3.4
Persentase Pemuda Kepala Rumah Tangga di Provinsi Maluku Utara menurut
Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2010



Hasil SP2010 menunjukkan bahwa sekitar 13,56 persen pemuda berstatus sebagai kepala rumah tangga (Gambar 3.4). Persentase pemuda laki-laki sebagai kepala rumah tangga sebesar 24,32 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan pemuda perempuan yang hanya sebesar 2,64 persen. Tingginya persentase pemuda laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga kemungkinan disebabkan budaya yang umum berlaku di masyarakat bahwa kepala rumah tangga adalah laki-laki. Gambaran serupa juga terjadi di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 3.4
Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Kelompok Umur (Tahun),
Status dalam Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, 2010

Kelompok Umur (Tahun)	Kepala Rumah Tangga			Istri/Suami			Anak			Lainnya		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
16-20	3,11	2,33	2,73	0,00	8,08	3,93	70,92	60,42	65,81	25,96	29,17	27,52
21-25	21,05	3,27	12,15	0,01	35,85	17,95	47,10	33,30	40,19	31,83	27,58	29,71
26-30	48,22	2,32	25,24	0,02	60,86	30,48	27,42	18,98	23,20	24,34	17,84	21,08
16-30	24,32	2,64	13,56	0,01	35,57	17,65	48,37	37,09	42,77	27,30	24,71	26,01

Berdasarkan kelompok umur, seperti pada Tabel 3.4 terlihat terjadi peningkatan persentase pemuda yang menjadi kepala rumah tangga seiring dengan meningkatnya umur. Persentase tertinggi pemuda yang berstatus kepala rumah tangga berada pada kelompok umur 26-30 tahun (25,24 persen). Pada kelompok umur 16-20 tahun, pemuda yang berstatus sebagai kepala rumah tangga sebanyak 2,73 persen, sedangkan pada kelompok umur 21-25 tahun sebesar 12,15 persen.

3.7 Fertilitas Pemuda

Tabel 3.5 memperlihatkan jumlah anak yang dilahirkan pemuda perempuan yang pernah kawin, dimana semakin tua usia pemuda perempuan (dengan asumsi semakin lama berumah tangga), semakin banyak anak yang dilahirkan. Persentase terbesar pemuda perempuan yang pernah kawin usia 16-20 adalah pernah melahirkan anak 1-2 orang, yaitu sebesar 59,59 persen. Pada kelompok umur 21-25 tahun persentase terbesar pada jumlah anak 1-2 orang sebesar 69,86 persen, begitu juga pada kelompok umur 26-30 tahun, persentase terbesar pada jumlah anak 1-2 orang sebesar 59,33 persen.

Tabel 3.5
Persentase Pemuda Perempuan di Provinsi Maluku Utara yang Pernah Kawin menurut Tipe Daerah, Kelompok Umur (Tahun) dan Jumlah Anak yang Dilahirkan, 2010

Tipe Daerah/ Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Anak Yang Dilahirkan				Jumlah
	0	1-2	3-4	>4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan (K)					
16-20	39,64	58,83	1,48	0,05	100,00
21-25	22,71	71,65	5,37	0,27	100,00
26-30	13,96	68,14	16,56	1,34	100,00
Total (16-30)	19,71	68,46	11,01	0,82	100,00
Perdesaan (D)					
16-20	37,19	59,80	2,93	0,08	100,00
21-25	17,95	69,25	11,76	1,04	100,00
26-30	9,87	56,13	29,04	4,95	100,00
Total (16-30)	16,23	61,40	19,46	2,91	100,00
K+D					
16-20	37,72	59,59	2,61	0,07	100,00
21-25	19,15	69,86	10,15	0,85	100,00
26-30	10,96	59,33	25,72	3,99	100,00
Total (16-30)	17,12	63,20	17,30	2,38	100,00

PENDIDIKAN

<http://www.buku.go.id>



Pendidikan Pemuda

Salah satu tujuan nasional negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan di bidang pendidikan guna meningkatkan kualitas SDM ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia. Bagi penduduk usia muda, pendidikan merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup di masa depan. Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28C Ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pendidikan penting untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas. Pendidikan akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja maupun peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Gambaran pendidikan pemuda Maluku Utara akan dibahas pada bagian ini. Indikator yang dicakup adalah kemampuan berbahasa Indonesia, angka partisipasi sekolah, angka buta aksara, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

4.1. Kemampuan Berbahasa Indonesia Pemuda

Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pasal 36 UUD 1945 menyatakan bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Dengan kemampuan berbahasa Indonesia seseorang dapat berkomunikasi dengan mudah, meskipun berbeda suku bangsa.

Tabel 4.1
Jumlah dan Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kemampuan Berbahasa Indonesia, 2010

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Mampu Berbahasa Indonesia		Tidak Mampu Berbahasa Indonesia		Jumlah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K)						
Laki-laki (L)	45.931	99,77	107	0,23	46.038	100,00
Perempuan (P)	45.085	99,76	108	0,24	45.193	100,00
L+P	91.016	99,76	215	0,24	91.231	100,00
Perdesaan (D)						
Laki-laki (L)	95.266	98,72	1.233	1,28	96.499	100,00
Perempuan (P)	94.828	98,68	1.268	1,32	96.096	100,00
L+P	190.094	98,70	2.501	1,30	192.595	100,00
K+D						
Laki-laki (L)	141.197	99,06	1.340	0,94	142.537	100,00
Perempuan (P)	139.913	99,03	1.376	0,97	141.289	100,00
L+P	281.110	99,04	2.716	0,96	283.826	100,00

Kemampuan berbahasa Indonesia pemuda menurut tipe daerah dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1. Berdasarkan Hasil SP2010, dari 285 ribu pemuda, 281 ribu (99,04 persen) diantaranya mampu berbahasa Indonesia, sedangkan sisanya 2.716 pemuda (0,96 persen) tidak mampu berbahasa Indonesia. Persentase pemuda menurut kemampuan berbahasa Indonesia antara pemuda laki-laki dan pemuda perempuan tidak jauh berbeda, dimana dari 143 ribu pemuda laki-laki 141 ribu (99,06 persen) diantaranya mampu berbahasa Indonesia dan dari 141 ribu pemuda perempuan 140 ribu (99,03 persen) diantaranya mampu berbahasa Indonesia.

Jika dilihat dari Tipe Daerah, kemampuan berbahasa Indonesia pemuda perkotaan lebih tinggi dari pemuda perdesaan, dimana dari 91,2 ribu pemuda perkotaan 91,0 (99,76 persen) diantaranya mampu berbahasa Indonesia, sedangkan dari 192,6 ribu pemuda perdesaan sebesar 190,1 ribu (98,70 persen) diantaranya yang mampu berbahasa Indonesia.

Tabel 4.2
Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara yang Mampu Berbahasa Indonesia menurut Kelompok Umur (Tahun), Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2010

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16-18	Laki-laki (L)	99,57	98,65	98,92
	Perempuan (P)	99,81	98,84	99,14
	L+P	99,69	98,74	99,03
19-24	Laki-laki (L)	99,85	98,72	99,13
	Perempuan (P)	99,74	98,69	99,06
	L+P	99,79	98,71	99,10
25-30	Laki-laki (L)	99,77	98,76	99,06
	Perempuan (P)	99,76	98,60	98,94
	L+P	99,76	98,68	99,00
Jumlah (16 - 30)	Laki-laki (L)	99,77	98,72	99,06
	Perempuan (P)	99,76	98,68	99,03
	L+P	99,76	98,70	99,04

Tabel 4.2 menunjukkan kemampuan berbahasa Indonesia dari pemuda berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan tipe daerah. Dilihat dari kelompok umur, dari total penduduk berusia 16-18 tahun, tercatat 99,03 persen diantaranya mampu berbahasa Indonesia, sedangkan pada kelompok umur pemuda 19-24 tahun, 99,10 persen diantaranya mampu berbahasa Indonesia dan pada kelompok umur 25-30 tahun, 99,00 persen diantaranya mampu berbahasa Indonesia.

4.2 Partisipasi Sekolah Pemuda

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, termasuk pemuda. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) yang dapat mendorong tegaknya pembangunan. Pemerintah terus berupaya melakukan peningkatan mutu dan jumlah fasilitas pendidikan agar mudah diakses masyarakat. Salah satu indikator pendidikan terkait dengan akses terhadap pendidikan adalah partisipasi sekolah.

Indikator partisipasi sekolah pemuda merupakan gambaran pemerataan akses pendidikan dan perluasan pelayanan pendidikan terhadap pemuda. Tingkat partisipasi sekolah pemuda pada sub bab ini menggambarkan bagaimana status pemuda dalam jenjang pendidikan formal.

Rendahnya akses pemuda terhadap pendidikan ditunjukkan oleh masih adanya pemuda yang tidak pernah sekolah. Pada tahun 2010 berdasarkan hasil SP2010 (Tabel 4.3), sebanyak 5.225 pemuda (1,84 persen) berstatus tidak/belum pernah sekolah, 219.849 pemuda (77,46 persen) berstatus tidak bersekolah lagi dan pemuda yang berstatus masih bersekolah sebanyak 58.752 pemuda (20,70 persen).

Tabel 4.3
Jumlah dan Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, 2010

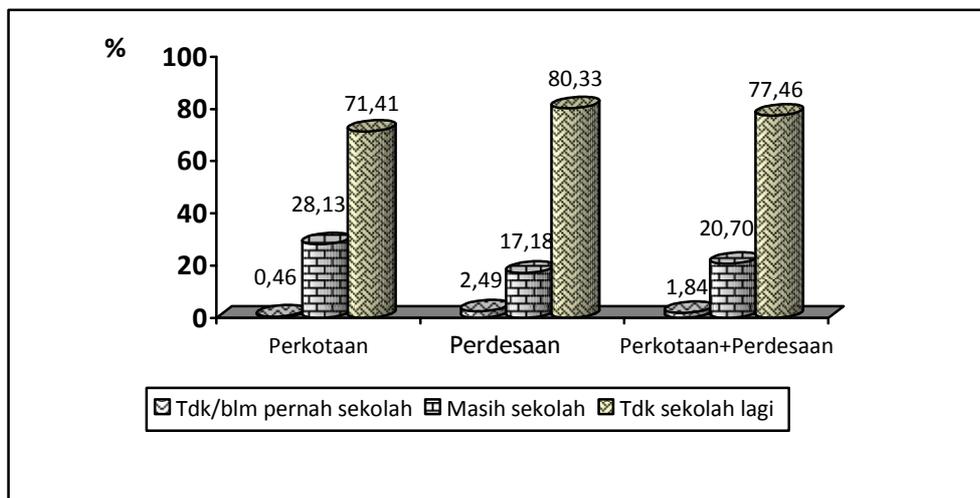
Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Tidak/Belum Pernah Sekolah		Masih Bersekolah		Tidak Bersekolah Lagi		Jumlah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perkotaan (K)								
Laki-laki (L)	222	0,48	12.915	28,05	32.901	71,46	46.038	100,00
Perempuan (P)	201	0,44	12.746	28,20	32.246	71,35	45.193	100,00
L+P	423	0,46	25.661	28,13	65.147	71,41	91.231	100,00
Perdesaan (D)								
Laki-laki (L)	2.344	2,43	17.721	18,36	76.434	79,21	96.499	100,00
Perempuan (P)	2.458	2,56	15.370	15,99	78.268	81,45	96.096	100,00
L+P	4.802	2,49	33.091	17,18	154.702	80,33	192.595	100,00
K+D								
Laki-laki (L)	2.566	1,80	30.636	21,49	109.335	76,71	142.537	100,00
Perempuan (P)	2.659	1,88	28.116	19,90	110.514	78,22	141.289	100,00
L+P	5.225	1,84	58.752	20,70	219.849	77,46	283.826	100,00

Tabel 4.3 juga memberikan gambaran partisipasi sekolah pemuda menurut jenis kelamin dan tipe daerah. Pemuda perempuan yang pernah mengakses pendidikan formal lebih banyak dibandingkan pemuda laki-laki. Jumlah pemuda laki-laki yang masih bersekolah sebanyak 30.636 orang (21,49 persen) dan yang tidak bersekolah lagi sebanyak 109.335 orang (76,71 persen), sedangkan pemuda perempuan yang masih bersekolah sebanyak 28.116 orang (19,90 persen) dan yang tidak bersekolah lagi sebanyak 110.514 orang (78,22 persen).

Ketidakmerataan kesempatan memperoleh pendidikan dikarenakan ketersediaan fasilitas pendidikan yang lebih banyak di daerah perkotaan dan faktor pendukung seperti pendidikan orang tua yang lebih tinggi terdapat di daerah perkotaan.

Jumlah pemuda yang tidak/belum pernah mengakses pendidikan formal sebanyak 5.225 orang (laki-laki 2.566 orang, perempuan 2.659 orang). Jika dilihat menurut tipe daerah, jumlah pemuda yang tidak/belum pernah mengakses pendidikan formal di daerah perdesaan (4.802 orang) lebih dari sepuluh kali lipat dibandingkan daerah perkotaan (423 orang).

Gambar 4.1
Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Tipe Daerah dan Partisipasi Sekolah, 2010



Penduduk yang tergolong usia sekolah seharusnya berstatus masih sekolah. Bagian dari pemuda yang termasuk usia sekolah adalah penduduk yang berusia 16-18 tahun dan 19-24 tahun. Indikator yang digunakan untuk melihat akses penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS).

APS 16-18 tahun dan APS 19-24 tahun masih sangat rendah. APS 16-18 tahun sebesar 62,07 persen dan APS 19-24 tahun sebesar 18,74 persen. Dilihat menurut jenis kelamin, APS 16-18 tahun perempuan (61,80) lebih rendah dibandingkan APS 16-18 tahun laki-laki (62,33). Kecenderungan ini mungkin disebabkan budaya patriarkis. Orangtua terutama yang berasal dari keluarga miskin cenderung menyekolahkan anak laki-laki. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan lebih baik menikah atau bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau buruh informal. (Ari Kristianawati, Kesetaraan: Pendidikan Berbasis Gender, 2010).

Dilihat menurut tipe daerah, APS 16-18 tahun dan APS 19-24 tahun di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Di daerah perkotaan APS 16-18 tahun sebesar 68,40 persen dan APS 19-24 tahun sebesar 31,64 persen dan di daerah perdesaan APS 16-18 tahun sebesar 59,39 persen dan APS 19-24 tahun sebesar 11,51 persen.

Masih rendahnya APS 16-18 tahun dan APS 19-24 tahun disebabkan kelompok pemuda usia sekolah ini tidak menjadi program wajib belajar, dan semakin tinggi pendidikan semakin mahal biaya pendidikan yang harus dikeluarkan.

Tabel 4.4
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Kelompok Umur (Tahun), Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2010

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16-18	Laki-laki (L)	68,26	59,94	62,33
	Perempuan (P)	68,53	58,77	61,80
	L+P	68,40	59,39	62,07
19-24	Laki-laki (L)	31,02	12,91	19,51
	Perempuan (P)	32,28	10,12	17,97
	L+P	31,64	11,51	18,74
25-30	Laki-laki (L)	5,76	1,67	2,91
	Perempuan (P)	3,85	1,41	2,12
	L+P	4,81	1,54	2,51
Jumlah (16 - 30)	Laki-laki (L)	28,05	18,36	21,49
	Perempuan (P)	28,20	15,99	19,90
	L+P	28,13	17,18	20,70

Umur mempengaruhi angka partisipasi sekolah pemuda. Semakin tinggi umur pemuda angka partisipasi sekolah cenderung semakin turun. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa APS pemuda yang berusia 16-18 tahun tercatat sebesar 62,07 persen, 19-24 tahun sebesar 18,74 persen, dan APS pemuda usia 25-30 tahun sebesar 2,51 persen.

4.3 Angka Buta Aksara Pemuda

Kemampuan baca tulis atau melek aksara (*literacy*) penduduk, menjadi ukuran yang sangat mendasar bagi tingkat pendidikan. Melek aksara merupakan salah satu indikator keberhasilan bidang pendidikan. Angka ini

juga sebagai salah satu komponen penyusunan Indeks Pembangunan Manusia yang merefleksikan kualitas pembangunan manusia di suatu negara.

Berbagai kebijakan pemerintah dalam pemberantasan buta aksara telah dilakukan diantaranya kursus A-B-C, Program Pemberantasan Buta Aksara Fungsional yang saat ini populer dengan nama Program Keaksaraan Fungsional. Program ini bertujuan memberantas kebutaaksaraan melalui diskusi, membaca, menulis, berhitung dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam aktivitas berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari.

Tabel 4.5
Jumlah dan Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2010

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Dapat Membaca dan Menulis				Buta Aksara		Jumlah	
	Huruf latin		Huruf Lainnya		Jumlah	%	Jumlah	%
	Jumlah	%	Jumlah	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perkotaan (K)								
Laki-laki (L)	45.855	99,60	4	0,01	179	0,39	46.038	100,00
Perempuan (P)	44.991	99,55	4	0,01	198	0,44	45.193	100,00
L+P	90.846	99,58	8	0,01	377	0,41	91.231	100,00
Perdesaan (D)								
Laki-laki (L)	94.322	97,74	49	0,05	2.128	2,21	96.499	100,00
Perempuan (P)	93.744	97,55	40	0,04	2.312	2,41	96.096	100,00
L+P	188.066	97,65	89	0,05	4.440	2,31	192.595	100,00
K+D								
Laki-laki (L)	140.177	98,34	53	0,04	2.307	1,62	142.537	100,00
Perempuan (P)	138.735	98,19	44	0,03	2.510	1,78	141.289	100,00
L+P	278.912	98,27	97	0,03	4.817	1,70	283.826	100,00

Jumlah dan persentase pemuda menurut tipe daerah dan jenis kelamin dan kemampuan membaca dan menulis berdasarkan hasil SP2010 disajikan pada Tabel 4.5. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa jumlah pemuda yang mampu membaca dan menulis huruf latin sebanyak 278.912 orang (98,27 persen), huruf lainnya sebanyak 97 orang (0,03 persen) dan pemuda yang buta aksara sebanyak 4.817 orang atau sekitar 1,70 persen.

Tabel 4.5 juga menunjukkan persentase pemuda yang buta aksara di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Hasil SP2010 menunjukkan bahwa persentase pemuda yang buta aksara di daerah perdesaan

sebesar 2,31 persen (laki-laki sebesar 2,21 persen dan perempuan sebesar 2,41 persen) dan di daerah perkotaan sebesar 0,41 persen (laki-laki sebesar 0,39 persen dan perempuan sebesar 0,44 persen).

Angka buta aksara pemuda perempuan (1,78 persen) lebih tinggi dibandingkan pemuda laki-laki (1,62 persen). Pola ini terjadi baik di daerah perdesaan, maupun daerah perkotaan.

Tabel 4.6
Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara yang Buta Aksara menurut
Kelompok Umur (Tahun), Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2010

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16-18	Laki-laki (L)	0,36	2,04	1,56
	Perempuan (P)	0,48	1,81	1,40
	L+P	0,42	1,93	1,48
19-24	Laki-laki (L)	0,36	2,27	1,58
	Perempuan (P)	0,30	2,48	1,71
	L+P	0,33	2,38	1,64
25-30	Laki-laki (L)	0,43	2,23	1,69
	Perempuan (P)	0,57	2,62	2,02
	L+P	0,50	2,43	1,85
Jumlah (16 - 30)	Laki-laki (L)	0,39	2,21	1,62
	Perempuan (P)	0,44	2,41	1,78
	L+P	0,41	2,31	1,70

Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka buta aksara. Seperti yang terlihat pada Tabel 4.6, angka buta aksara pemuda cenderung semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya umur. Angka buta aksara pemuda pada kelompok umur 16-18 tahun sebesar 1,48 persen, kelompok umur 19-24 tahun sebesar 1,64 persen dan kelompok umur 25-30 tahun sebesar 1,85 persen. ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

4.4 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pemuda

Gambaran sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Sasaran kepemudaan di bidang pendidikan di antaranya rata-rata lama sekolah sekurang-kurangnya 8,25 tahun, dikaitkan dengan program wajib belajar 9 tahun mengharuskan minimal pendidikan pemuda adalah tamat SMP/ sederajat. Jumlah dan persentase pemuda menurut tipe daerah, jenis kelamin dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan disajikan pada Tabel 4.7. Separuh lebih (68,64 persen) pemuda berpendidikan sekurang-kurangnya tamat SMP/ sederajat, dan sisanya berpendidikan SD/ sederajat ke bawah. Persentase pemuda yang tidak pernah sekolah sebesar 1,83 persen, tidak/ belum tamat SD/ sederajat 5,53 persen dan tamat SD/ sederajat 23,99 persen. Keadaan ini secara umum mencerminkan masih rendahnya tingkat pendidikan pemuda di Maluku Utara.

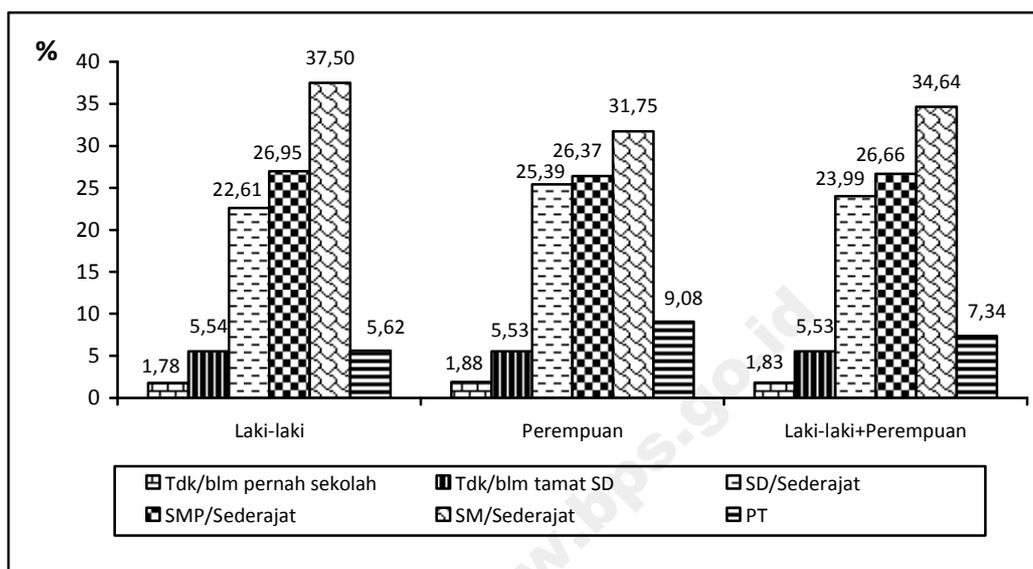
Dilihat menurut Tipe Daerah, tingkat pendidikan pemuda di daerah perkotaan lebih baik dibandingkan dengan di perdesaan. Persentase pemuda di daerah perkotaan yang minimal tamat SMP/ sederajat (89,43 persen) lebih besar dibandingkan dengan pemuda di perdesaan (58,80 persen).

Tabel 4.7
Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Tipe daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2010

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Tdk/Bm Pernah Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	Akademi/ Perguruan Tinggi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkotaan							
Laki-laki (L)	0,48	1,85	8,28	22,38	57,90	9,11	100,00
Perempuan (P)	0,44	1,76	8,33	22,69	53,03	13,75	100,00
L + P	0,46	1,80	8,30	22,54	55,49	11,40	100,00
Perdesaan (D)							
Laki-laki (L)	2,41	7,30	29,44	29,12	27,78	3,96	100,00
Perempuan (P)	2,55	7,30	33,41	28,10	21,75	6,89	100,00
L + P	2,48	7,30	31,41	28,61	24,78	5,41	100,00
Perkotaan + Perdesaan (K+D)							
Laki-laki (L)	1,78	5,54	22,61	26,95	37,50	5,62	100,00
Perempuan (P)	1,88	5,53	25,39	26,37	31,75	9,08	100,00
L + P	1,83	5,53	23,99	26,66	34,64	7,34	100,00

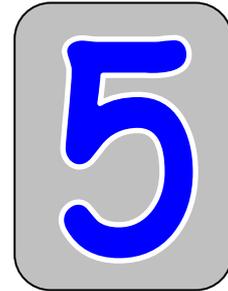
Dilihat menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan yang ditamatkan pemuda laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Persentase pemuda laki-laki yang minimal tamat SMP/ sederajat sebesar 70,07 persen dan perempuan minimal tamat SMP/ sederajat sebesar 67,20 persen (Gambar 4.2).

Gambar 4.2
Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2010



KETENAGAKERJAAN

<http://www.bk.go.id>



Ketenagakerjaan Pemuda

Pemuda merupakan kelompok Sumber Daya Manusia (SDM) yang paling potensial dibandingkan dengan kelompok penduduk lainnya. Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, populasi pemuda Indonesia cukup besar dan terbesar di berbagai wilayah. Gambaran tersebut secara nyata merefleksikan gambaran kuantitatif potensi sumber daya pemuda.

Tingkat produktivitas sumber daya pemuda secara umum lebih tinggi dari kelompok penduduk lainnya, merupakan potensi lainnya yang dimiliki sumber daya pemuda. Sebagian penduduk yang berusia di bawah usia pemuda (< 15 tahun) pada umumnya masih bersekolah. Sebagian lainnya walaupun telah memasuki angkatan kerja namun karena faktor usia yang masih terlampau muda, keterampilan dan pengalaman yang mereka miliki masih sangat terbatas sehingga produktivitasnya cenderung rendah. Sementara itu, kelompok penduduk yang lebih tua dari pemuda (> 30 tahun) diantaranya mencakup lansia dan mereka yang menjelang usia lansia. Kemampuan fisik

maupun mental dari para penduduk tua umumnya semakin berkurang karena faktor usia.

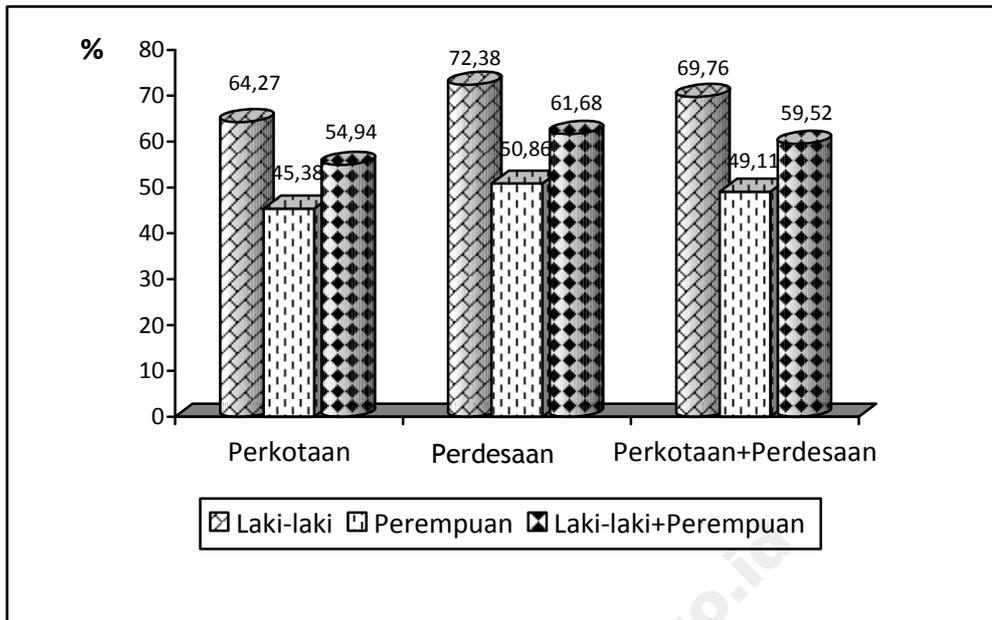
Sejalan dengan kenyataan di atas, arah dan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan khususnya upaya perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan baru seyogyanya lebih diprioritaskan pada upaya pemberdayaan pemuda. Pada sisi lain, pembangunan ketenagakerjaan juga perlu ditunjang dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya terutama para pemuda. Hal ini sejalan dengan peranan sumber daya pemuda sebagai tenaga pelaksana pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung turut menentukan langkah, karakteristik dan keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Kondisi dan situasi ketenagakerjaan pemuda yang dibahas pada bagian ini meliputi partisipasi pemuda dalam angkatan kerja, lapangan usaha, status pekerjaan, dan tingkat pengangguran. Hasil pembahasan pada bagian ini secara keseluruhan akan dapat memberikan gambaran secara makro mengenai potensi, peranan dan kontribusi pemuda dalam kegiatan pembangunan ekonomi.

5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda

Salah satu indikator yang digunakan dalam ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan salah satu ukuran yang sering dipakai untuk melihat fluktuasi dari partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. TPAK didefinisikan sebagai perbandingan antara penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau disebut angkatan kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) terhadap seluruh penduduk usia kerja. Pada kelompok pemuda, TPAK merupakan proporsi pemuda (penduduk **usia 16-30 tahun**) yang terlibat dalam kegiatan ekonomi terhadap pemuda itu sendiri.

Gambar 5.1
TPAK Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2010



Pada tahun 2010, pemuda yang terlibat dalam kegiatan ekonomi cukup besar. Berdasarkan data SP2010, TPAK pemuda sebesar 59,52 persen, seperti yang terlihat pada Gambar 5.1. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 pemuda, sekitar 60 orang di antaranya aktif melakukan kegiatan ekonomi. TPAK pemuda di daerah perdesaan sebesar 61,68 persen lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan (54,94 persen). Besarnya TPAK tersebut menggambarkan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan.

TPAK pemuda laki-laki (69,76 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK pemuda perempuan (49,11 persen) (Gambar 5.1). Di perkotaan, TPAK pemuda laki-laki sebesar 64,27 persen sedangkan TPAK pemuda perempuan hanya sebesar 45,38 persen. Di daerah perdesaan, perbedaan TPAK pemuda laki-laki dan perempuan terlihat lebih mencolok, TPAK laki-laki tercatat sebesar 72,38 persen sedangkan TPAK pemuda perempuan sebesar 50,86 persen.

Tabel 5.1
TPAK Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Jenis Kelamin dan
Kelompok Umur (Tahun), 2010

Jenis Kelamin	16 - 20	21 - 25	26 - 30	Total (16 - 30)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki (L)	38,32	78,32	92,55	69,76
Perempuan (P)	27,50	54,96	63,67	49,11
L + P	33,05	66,63	78,09	59,52

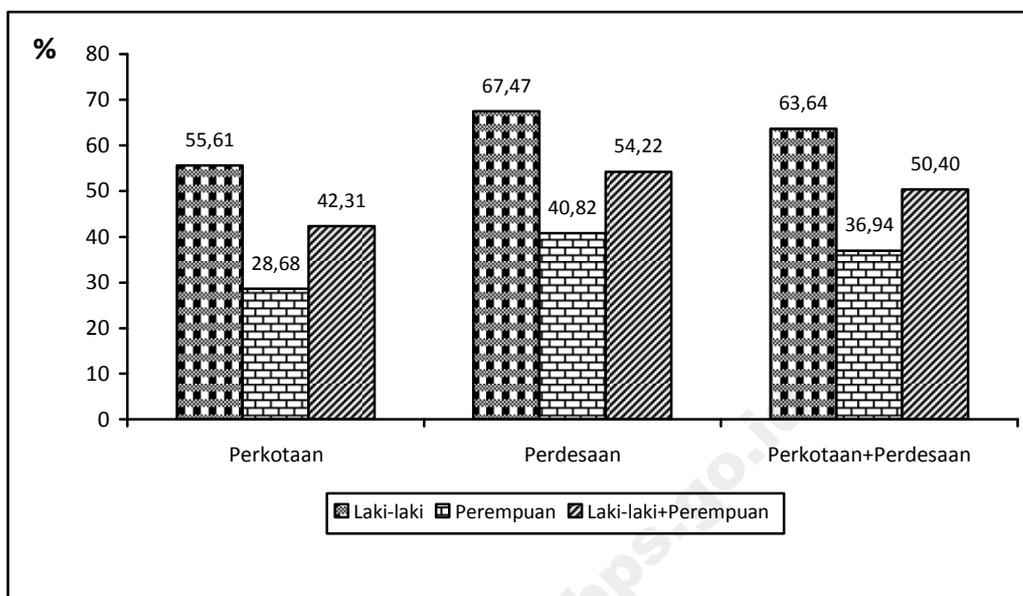
Semakin tinggi kelompok umur pemuda semakin tinggi TPAK. Tabel 5.1 menunjukkan bahwa kelompok umur 26-30 tahun memiliki TPAK paling tinggi dibandingkan kelompok umur lainnya. Kelompok umur 16-20 tahun memiliki TPAK yang paling kecil yaitu sebesar 33,05 persen, karena pemuda kelompok umur 16-20 tahun merupakan kelompok usia sekolah dan bukan sebagai penanggung jawab utama rumah tangga.

Dilihat menurut jenis kelamin, TPAK pemuda laki-laki pada kelompok umur 16-20 tahun sebesar 38,32 persen, kelompok umur 21-25 tahun sebesar 78,32 persen dan kelompok umur 26-30 tahun sebesar 92,55 persen. TPAK pemuda perempuan pada kelompok umur 16-20 tahun sebesar 27,50 persen, kelompok umur 21-25 tahun sebesar 54,96 persen, dan pada kelompok umur 26-30 tahun sebesar 63,67 persen.

Berdasarkan data SP2010, sebesar 50,40 persen pemuda berstatus bekerja (Gambar 5.2). Berdasarkan tipe daerah, persentase pemuda di daerah perdesaan yang bekerja (54,22 persen) lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan (42,31 persen). Kondisi ini antara lain disebabkan oleh jenis pekerjaan di perdesaan bersifat informal yang tidak memerlukan persyaratan khusus, sedangkan di perkotaan lebih banyak pekerjaan yang bersifat formal yang memerlukan persyaratan terutama pendidikan. Struktur perekonomian di daerah perdesaan masih didominasi oleh sektor pertanian, yang diduga menjadi faktor tingginya persentase pemuda bekerja. Sektor pertanian tidak

memerlukan kualifikasi atau persyaratan tertentu seperti pendidikan, keterampilan, pengalaman maupun keahlian khusus.

Gambar 5.2
Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara yang Bekerja menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2010



Pada Gambar 5.2 terlihat bahwa persentase pemuda laki-laki yang bekerja (63,64 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda perempuan (36,94 persen). Keadaan ini berlaku di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Latar belakang tingkat pendidikan yang dimiliki pada dasarnya mempunyai pengaruh terhadap status pekerjaan. Seperti yang diperlihatkan pada Tabel 5.2, persentase tertinggi pemuda yang bekerja adalah mereka yang berpendidikan Sekolah Menengah (SM) sebesar 30,75 persen, kemudian berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 28,40 persen dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 20,65 persen. Sedangkan pemuda yang bekerja tetapi tidak/belum pernah sekolah persentasenya hanya sebesar 2,15 persen.

Bila diperhatikan menurut tipe daerah, di daerah perkotaan, persentase tertinggi pemuda yang bekerja adalah mereka yang berpendidikan SM (50,27 persen), kemudian berpendidikan SMP (16,78 persen) dan SD (10,20 persen). Sedangkan di daerah perdesaan, persentase tertinggi pemuda yang bekerja

adalah mereka yang berpendidikan SD (35,12 persen), kemudian SM (23,54 persen) dan SMP (22,08 persen).

Tabel 5.2
Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara yang Bekerja menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2010

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	Akademi/ PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K)						
Laki-laki (L)	0,45	2,23	10,81	18,48	54,70	13,33
Perempuan (P)	0,47	2,09	8,98	13,40	41,46	33,60
L+P	0,46	2,18	10,20	16,78	50,27	20,11
Perdesaan (D)						
Laki-laki (L)	2,62	8,12	33,87	23,35	26,99	5,06
Perempuan (P)	3,03	8,14	37,20	19,97	17,77	13,88
L+P	2,78	8,13	35,12	22,08	23,54	8,36
Perkotaan + Perdesaan (K+D)						
Laki-laki (L)	2,01	6,46	27,37	21,97	34,80	7,39
Perempuan (P)	2,40	6,64	30,20	18,34	23,65	18,77
L+P	2,15	6,52	28,40	20,65	30,75	11,53

5.2 Pemuda Bekerja menurut Lapangan Usaha

Lapangan usaha menunjukkan bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha dimana seseorang bekerja. Komposisi pemuda yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu indikator untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja pemuda. Selain itu, indikator ini juga digunakan untuk melihat gambaran secara makro struktur perekonomian di Provinsi Maluku Utara serta perkembangannya.

Lapangan usaha perkebunan memegang peran penting bagi ketenagakerjaan pemuda di Provinsi Maluku Utara. Hal ini dapat dilihat dari hasil SP2010, dimana dari 144 ribu pemuda yang bekerja, 32 ribu (22,04 persen) diantaranya bekerja pada lapangan usaha perkebunan. Lapangan usaha

lainnya yang banyak menyerap tenaga kerja pemuda adalah pertanian tanaman padi dan palawija, dan jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan perorangan, masing-masing sebesar 24 ribu (16,75 persen) dan 20 ribu (14,05 persen). Lapangan usaha yang relatif sedikit menyerap tenaga kerja pemuda adalah peternakan (0,12 persen), listrik dan gas (0,18 persen), informasi dan komunikasi (0,42 persen), serta keuangan dan asuransi (0,72 persen).

Tabel 5.3
Jumlah dan Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara yang Bekerja
menurut Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, 2010

Lapangan Usaha	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan +Perdesaan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian tanaman padi dan palawija	997	2,57	23.079	21,98	24.076	16,75
Hortikultura	358	0,92	3.527	3,36	3.885	2,70
Perkebunan	728	1,88	30.953	29,48	31.681	22,04
Perikanan	716	1,85	6.145	5,85	6.861	4,77
Peternakan	20	0,05	156	0,15	176	0,12
Kehutanan dan pertanian lainnya	45	0,12	1.136	1,08	1.181	0,82
Pertambangan & Penggalian	339	0,87	3.605	3,43	3.944	2,74
Industri Pengolahan	706	1,82	1.194	1,14	1.900	1,32
Listrik dan Gas	146	0,38	116	0,11	262	0,18
Konstruksi	2.345	6,05	3.088	2,94	5.433	3,78
Perdagangan	7.187	18,54	6.360	6,06	13.547	9,42
Hotel dan rumah makan	1.306	3,37	296	0,28	1.602	1,11
Transportasi, Pergudangan	6.627	17,10	7.859	7,48	14.486	10,08
Informasi dan Komunikasi	496	1,28	111	0,11	607	0,42
Keuangan dan Asuransi	711	1,83	318	0,30	1.029	0,72
Jasa pendidikan	2.367	6,11	6.555	6,24	8.922	6,21
Jasa kesehatan	1.333	3,44	1.353	1,29	2.686	1,87
Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan perorangan	11.924	30,76	8.272	7,88	20.196	14,05
Lainnya	414	1,07	879	0,84	1.293	0,90
Jumlah	38.765	100,00	105.002	100,00	143.767	100,00

Struktur pekerjaan pemuda menjadi berbeda jika dilihat berdasarkan tipe daerah (Tabel 5.3). Di daerah perkotaan, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja pemuda adalah sektor jasa kemasyarakatan, perdagangan dan transportasi & pergudangan dengan persentase masing-masing sebesar 30,76 persen, 18,54 persen dan 17,10 persen. Sedangkan di daerah perdesaan, sektor yang masih menjadi primadona dalam kegiatan perekonomian adalah sektor perkebunan (29,48 persen) dan pertanian tanaman padi dan palawija (21,98 persen).

Berdasarkan jenis kelamin (Tabel 5.4), ada sedikit perbedaan jenis lapangan usaha yang dipilih oleh pemuda laki-laki dan perempuan. Pada lapangan usaha perkebunan, transportasi dan perikanan tampak bahwa persentase pekerja pemuda laki-laki lebih besar dibandingkan pemuda perempuan. Persentase pemuda laki-laki yang bekerja pada lapangan usaha perkebunan, transportasi dan pergudangan, dan perikanan masing-masing sebesar 27,37 persen, 15,57 persen, dan 6,46 persen sedangkan pemuda perempuan masing-masing sebesar 12,71 persen, 0,46 persen, dan 1,81 persen. Sebaliknya pada sektor pertanian tanaman padi dan palawija, perdagangan dan sektor jasa kemasyarakatan terlihat bahwa persentase pemuda perempuan lebih besar dibandingkan pemuda laki-laki. Persentase pemuda perempuan yang bekerja pada sektor pertanian tanaman padi dan palawija, perdagangan, jasa pendidikan dan hortikultura masing-masing sebesar 29,67 persen, 14,37 persen, 11,66 persen dan 5,30 persen. Sedangkan pemuda laki-laki yang bekerja pada sektor yang sama persentasenya sebesar 9,36 persen, 6,60 persen, 3,09 persen dan 1,22 persen.

Tabel 5.4
Jumlah dan Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara yang Bekerja
menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, 2010

Lapangan Usaha	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian tanaman padi dan palawija	8.566	9,36	15.510	29,67	24.076	16,75
Hortikultura	1.116	1,22	2.769	5,30	3.885	2,70
Perkebunan	25.039	27,37	6.642	12,71	31.681	22,04
Perikanan	5.913	6,46	948	1,81	6.861	4,77
Peternakan	135	0,15	41	0,08	176	0,12
Kehutanan dan pertanian lainnya	1.090	1,19	91	0,17	1.181	0,82
Pertambangan & Penggalian	3.438	3,76	506	0,97	3.944	2,74
Industri Pengolahan	1.351	1,48	549	1,05	1.900	1,32
Listrik dan Gas	222	0,24	40	0,08	262	0,18
Konstruksi	5.178	5,66	255	0,49	5.433	3,78
Perdagangan	6.037	6,60	7.510	14,37	13.547	9,42
Hotel dan rumah makan	798	0,87	804	1,54	1.602	1,11
Transportasi, Pergudangan	14.244	15,57	242	0,46	14.486	10,08
Informasi dan Komunikasi	431	0,47	176	0,34	607	0,42
Keuangan dan Asuransi	529	0,58	500	0,96	1.029	0,72
Jasa pendidikan	2.825	3,09	6.097	11,66	8.922	6,21
Jasa kesehatan	768	0,84	1.918	3,67	2.686	1,87
Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan perorangan	13.079	14,29	7.117	13,62	20.196	14,05
Lainnya	737	0,81	556	1,06	1.293	0,90
Jumlah	91.496	100,00	52.271	100,00	143.767	100,00

5.3 Pemuda Bekerja menurut Status Pekerjaan

Pola penyebaran tenaga kerja sangat tergantung dari kualitas sumberdaya manusianya. SDM yang berkualitas dari sisi kesehatan, pendidikan, keahlian dan ketrampilan akan mempunyai tingkat produktivitas yang jauh lebih baik. Distribusi pemuda yang bekerja menurut status pekerjaan memberikan gambaran tentang kedudukan seseorang dalam pekerjaan. Status pekerjaan dibagi menjadi enam, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

Tabel 5.5
Jumlah dan Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara yang Bekerja
menurut Status Pekerjaan dan Tipe Daerah, 2010

Status Pekerjaan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha Sendiri	9.183	23,69	28.122	26,81	37.305	25,97
Berusaha Dibantu Buruh Tdk Tetap/Tidak Dibayar	939	2,42	11.137	10,62	12.076	8,41
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar	1.473	3,80	3.440	3,28	4.913	3,42
Buruh/Karyawan	21.791	56,21	21.800	20,78	43.591	30,35
Pekerja Bebas	2.134	5,50	7.569	7,22	9.703	6,75
Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	3.245	8,37	32.818	31,29	36.063	25,10
Jumlah	38.765	100,00	104.886	100,00	143.651	100,00

Sepertiga pemuda (30,35 persen) yang bekerja, bekerja sebagai buruh/karyawan, kemudian yang berusaha sendiri sebanyak 37 ribu orang (25,97 persen)), dan sebagai pekerja tidak dibayar sebanyak 36 ribu orang (25,10 persen. Dilihat menurut Tipe Daerah, separuh (56,21 persen) pemuda perkotaan yang bekerja, bekerja sebagai buruh/karyawan, kemudian berusaha

sendiri sebanyak 9 ribu orang (23,69 persen) dan pekerja keluarga/tidak dibayar sebanyak 3 ribu orang (8,37 persen). Sedangkan pemuda perdesaan yang bekerja, hampir sepertiganya (31,29 persen) bekerja sebagai pekerja tidak dibayar, kemudian berusaha sendiri sebanyak 28 ribu orang (26,81 persen), dan sebagai buruh/karyawan sebanyak 22 ribu orang (20,78 persen).

Tabel 5.6
Jumlah dan Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2010

Status Pekerjaan	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha Sendiri	28.674	31,37	8.631	16,52	37.305	25,97
Berusaha Dibantu Buruh Tdk Tetap/Tidak Dibayar	9.078	9,93	2.998	5,74	12.076	8,41
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar	4.248	4,65	665	1,27	4.913	3,42
Buruh/Karyawan	26.386	28,87	17.205	32,93	43.591	30,35
Pekerja Bebas	8.436	9,23	1.267	2,42	9.703	6,75
Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	14.575	15,95	21.488	41,12	36.063	25,10
Jumlah	91.397	100,00	52.254	100,00	143.651	100,00

Tabel 5.6 memperlihatkan pemuda yang bekerja menurut status pekerjaan dan jenis kelamin. Dilihat menurut jenis kelamin, sepertiga (31,37 persen) pemuda laki-laki yang bekerja berstatus sebagai berusaha sendiri, kemudian buruh/karyawan (28,87 persen), dan sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar (15,95 persen). Pada pemuda perempuan yang bekerja, sepertiga lebih bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar (41,12 persen), kemudian sebagai buruh/karyawan (32,93 persen), dan berstatus berusaha sendiri (16,52 persen). Persentase pemuda perempuan yang bekerja dengan status sebagai pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar (41,12 persen) hampir tiga kali lebih

tinggi daripada pemuda laki-laki (15,95 persen). Kondisi ini merupakan salah satu isu gender sektor tenaga kerja terutama di negara berkembang.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas pekerja, di antaranya adalah keahlian, pengalaman kerja, usia, dan pendidikan. Pekerja dengan pendidikan yang lebih tinggi, secara umum mempunyai produktivitas kerja yang lebih baik. Tabel 5.7 menyajikan gambaran pemuda yang bekerja menurut status pekerjaan dan pendidikan yang ditamatkan. Terlihat fenomena yang menarik pada pemuda yang bekerja sebagai buruh/karyawan dengan pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak tenaga kerja yang terserap sebagai buruh/karyawan. Hal tersebut terlihat pada pemuda dengan pendidikan Sekolah Menengah (SM) dan Perguruan Tinggi (PT), dimana persentase pemuda yang berstatus sebagai buruh/karyawan mencapai lebih dari 60 persen (SM sebesar 46,11 persen dan PT sebesar 88,84 persen).

Tabel 5.7
Persentase Pemuda di Provinsi Maluku Utara yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2010

Status Pekerjaan (1)	Tdk/Blm Pernah (2)	Tdk/Blm Tamat SD (3)	SD/ Sederajat (4)	SMP/ Sederajat (5)	SM/ Sederajat (6)	Akademi/ PT (7)
Berusaha Sendiri	26,89	29,73	31,52	30,95	24,45	5,12
Berusaha dibantu Buruh	15,90	14,07	12,78	9,77	4,57	0,80
Berusaha dibantu Buruh	1,97	2,47	3,25	4,11	4,10	1,61
Buruh/Karyawan	5,59	7,73	7,96	14,71	46,11	88,84
Pekerja Bebas	9,53	8,58	7,67	8,77	6,11	1,06
Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	40,11	37,42	36,81	31,69	14,65	2,58
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

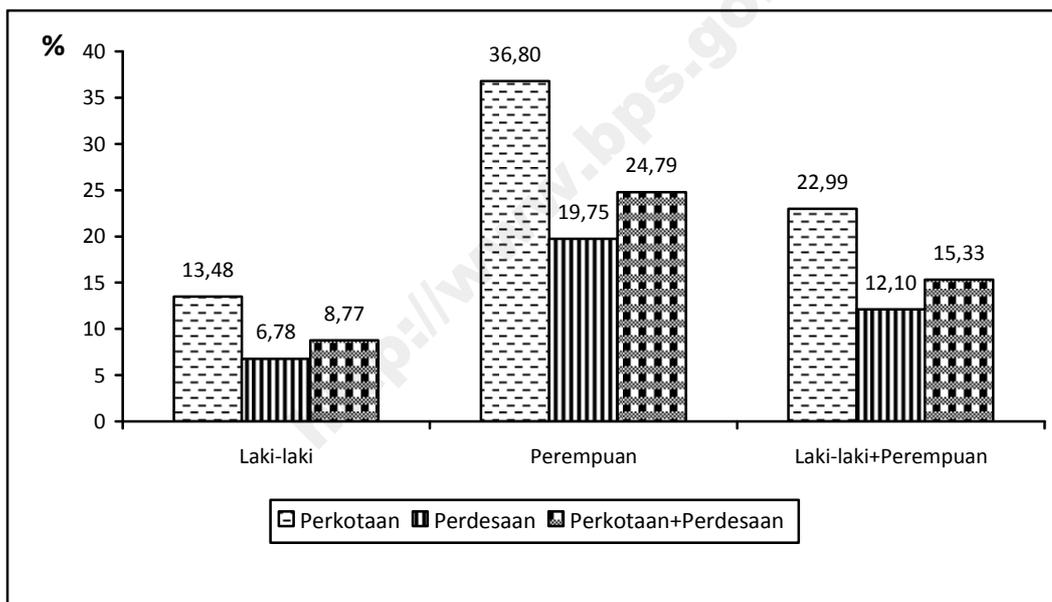
5.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda

Pengangguran merupakan akibat dari ketidakmampuan lapangan kerja menyerap angkatan kerja yang tersedia. Hal hal ini disebabkan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia serta bertambahnya jumlah penduduk. Pertumbuhan

ekonomi yang rendah dalam menyediakan lapangan kerja baru disinyalir menjadi penyebab munculnya masalah pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran. Indikator ini merupakan perbandingan antara banyaknya pemuda yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena tak mungkin mendapatkan pekerjaan termasuk putus asa, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja terhadap jumlah pemuda angkatan kerja. Gambar 5.4 menyajikan Tingkat Pengangguran Terbuka pemuda tahun 2010 yang dirinci menurut tipe daerah dan jenis kelamin.

Gambar 5.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2010



Sasaran kepemudaan di bidang ketenagakerjaan di antaranya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga 5-6 persen di tahun 2014. Berdasarkan hasil SP2010, tingkat pengangguran pemuda di Provinsi Maluku Utara tercatat sebesar 15,33 persen (Gambar 5.3). Angka tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata dari setiap 100 pemuda angkatan kerja sebanyak 15-16 pemuda belum mempunyai pekerjaan dan masih mencari pekerjaan. Bila dilihat menurut tipe daerah, TPT pemuda di perkotaan

cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT pemuda di perdesaan. TPT pemuda daerah perkotaan sebesar 22,99 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT pemuda daerah perdesaan yang sebesar 12,10 persen (Gambar 5.4).

Berdasarkan jenis kelamin, TPT pemuda perempuan (24,79 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan TPT pemuda laki-laki (8,77 persen). Pola yang sama juga terjadi di daerah perkotaan maupun perdesaan. Dari gambaran di atas perlu upaya serius dari pemerintah terkait dengan penurunan tingkat pengangguran.

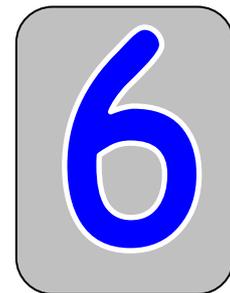
Tabel 5.8
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda di Provinsi Maluku Utara menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, 2010

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tdk/Blm Pernah sekolah	16,82	9,50	9,95
Tdk/Blm Tamat SD	17,70	11,09	11,73
SD/Sederajat	21,14	10,33	11,50
SMP/Sederajat	23,20	12,59	15,16
SM/Sederajat	26,65	16,56	21,33
Akademi/PT	13,82	6,32	10,00
Jumlah	22,99	12,10	15,33

Tingkat pengangguran terbuka pemuda menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tipe daerah disajikan pada Tabel 5.8. Sebagian besar pemuda yang menganggur adalah mereka yang berpendidikan tamat SM/Sederajat (21,33 persen), kemudian tamat SMP/Sederajat (15,16 persen) dan tamat SD/Sederajat (11,50 persen). Persentase pengangguran yang tamat SM/Sederajat di perkotaan sebesar 26,65 persen, sedangkan di daerah perdesaan persentasenya sebesar 16,56 persen.

KESULITAN FUNGSIONAL

<http://www.bppt.go.id>



Kesulitan Fungsional Pemuda

Informasi mengenai kesulitan fungsional yang dikumpulkan dalam SP2010 dapat digunakan sebagai pendekatan dalam menentukan program kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan penyandang cacat. Jumlah penduduk dengan disabilitas atau yang dikenal dengan penyandang cacat di Indonesia selama ini diperoleh melalui hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikumpulkan oleh BPS RI setiap 3 tahun sekali melalui Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP). Sebagai instansi pemerintah yang berkepentingan dengan penyandang cacat, Kementerian Sosial telah menerbitkan UU No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat. Dalam UU ini, Pasal 1 menyebutkan bahwa penyandang cacat, yang juga mengacu pada definisi yang dikeluarkan World Health Organization (WHO), adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Menurut UU ini, penyandang cacat dibedakan menjadi penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental,

serta penyandang cacat fisik dan mental (ganda). Konsep ini dipahami sebagai konsep normal dan abnormal yang mengacu pada anatomi tubuh manusia.

WHO memiliki tiga kategori berkaitan dengan kecacatan, yaitu *impairment*, *disability* dan *handicap*. *Impairment* didefinisikan sebagai kondisi ketidaknormalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis, atau anatomis. *Disability* adalah ketidakmampuan atau keterbatasan akibat adanya *impairment* untuk melakukan aktivitas secara normal bagi manusia. Sedangkan *handicap* merupakan keadaan seseorang sebagai akibat adanya *impairment*, *disability*, yang menghambatnya untuk berperan secara normal.

Kendala yang dialami selain berkaitan dengan perbedaan konsep dan definisi diantaranya adalah penyebutan penyandang cacat yang dirasa merugikan kedudukan penyandang cacat dan pemenuhan kebutuhan akan ketersediaan data dari berbagai pihak dengan kepentingan dan konsep yang berbeda. Data hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010) yang mengikuti konsep rekomendasi dari lembaga internasional (*UN recommendation*) disadari tidak akan dapat digunakan secara langsung untuk kepentingan instansi terkait atau kalangan pemerhati penyandang cacat. Namun informasi ini dapat digunakan sebagai informasi awal untuk mengetahui jumlah pemuda yang mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan dasar kehidupan mencakup melihat, mendengar, berjalan, mengingat, dan mengurus diri sendiri.

6.1. Gambaran Kesulitan Fungsional Pemuda menurut Tipe Daerah

Jumlah pemuda hasil pengolahan SP2010 sebanyak 285.279 orang, dari jumlah tersebut sekitar 283.826 orang ditanyakan mengenai kesulitan fungsional dengan menggunakan kuesioner C1, sisanya sebesar 1.453 pemuda tidak ditanyakan mengenai kesulitan fungsional bagi mereka penghuni flat/apartemen/perumahan sangat eksklusif, atau masyarakat terpencil (akses sangat sulit), atau rumah tangga di kolong jembatan (bangunan sangat tidak layak huni), atau pengungsi tenda, tunawisma, awak kapal, orang tinggal di gerbong kereta api, suku terasing, penghuni penjara dan barak militer, serta pasien rumah sakit jiwa.

Tabel 6.1
Jumlah Pemuda di Provinsi Maluku Utara yang Mempunyai Kesulitan
Fungsional menurut Tipe Daerah, Jenis Kesulitan dan Tingkat Kesulitan
2010

Tipe Daerah/ Jenis Kesulitan	Tidak Ada Kesulitan	Mengalami Kesulitan		Jumlah Kol (2) s.d Kol (4)	Persentase Kesulitan
		Sedikit	Parah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PERKOTAAN					
Melihat	90.794	402	35	91.231	0,48
Mendengar	91.056	123	52	91.231	0,19
Berjalan atau Naik Tangga	91.082	85	64	91.231	0,16
Mengingat atau Berkonsentrasi	90.917	174	140	91.231	0,34
Mengurus Diri Sendiri	90.806	364	61	91.231	0,47
PERDESAAN					
Melihat	191.950	569	76	192.595	0,33
Mendengar	191.967	455	173	192.595	0,33
Berjalan atau Naik Tangga	192.075	340	180	192.595	0,27
Mengingat atau Berkonsentrasi	191.707	524	364	192.595	0,46
Mengurus Diri Sendiri	191.944	465	186	192.595	0,34
PERKOTAAN+PERDESAAAN					
Melihat	282.744	971	111	283.826	0,38
Mendengar	283.023	578	225	283.826	0,28
Berjalan atau Naik Tangga	283.157	425	244	283.826	0,24
Mengingat atau Berkonsentrasi	282.624	698	504	283.826	0,42
Mengurus Diri Sendiri	282.750	829	247	283.826	0,38

Tabel 6.1 menyajikan jumlah pemuda menurut jenis dan tingkat kesulitan yang dialami oleh pemuda. Tabel tersebut memperlihatkan paling banyak pemuda mengalami kesulitan mengingat/berkonsentrasi, sebanyak 698 orang dengan tingkat kesulitan sedikit dan 504 orang dengan tingkat kesulitan parah. Jenis kesulitan lainnya yang dialami oleh pemuda adalah kesulitan melihat (971 orang mengalami kesulitan sedikit dan 111 orang kesulitan parah), kesulitan mengurus diri sendiri (829 orang kesulitan sedikit dan 247 kesulitan parah), kesulitan mengingat (698 orang kesulitan sedikit dan 504 kesulitan parah), dan kesulitan mendengar (578 orang kesulitan sedikit dan 225 kesulitan parah).

Jika dilihat menurut tipe daerah terlihat bahwa jenis kesulitan fungsional yang paling banyak dialami oleh pemuda di perkotaan adalah

kesulitan melihat. Jumlah pemuda di perkotaan yang mengalami kesulitan ini sebanyak 437 orang dengan rincian 402 orang dengan tingkat kesulitan sedikit dan 35 orang dengan tingkat kesulitan parah. Sedangkan di daerah perdesaan, jenis kesulitan fungsional yang paling banyak dialami pemuda di perdesaan adalah kesulitan mengingat atau berkonsentrasi, sebanyak 524 orang dengan tingkat kesulitan sedikit dan 364 orang dengan tingkat kesulitan parah.

6.2. Gambaran Kesulitan Fungsional Pemuda menurut Jenis Kelamin

Dilihat menurut jenis kelamin terlihat bahwa kesulitan fungsional mengingat/berkonsentrasi merupakan jenis kesulitan yang paling banyak dialami oleh pemuda laki-laki sedangkan pada pemuda perempuan kesulitan yang paling banyak dialami adalah melihat (Tabel 6.2). Jumlah pemuda laki-laki yang mengalami kesulitan mengingat/berkonsentrasi sebanyak 648 orang dengan rincian 375 orang dengan tingkat kesulitan sedikit dan 273 orang dengan tingkat kesulitan parah. Jenis kesulitan lainnya yang banyak dialami oleh pemuda laki-laki adalah kesulitan mengurus diri sendiri sebanyak 578 orang dengan rincian 436 orang dengan tingkat kesulitan sedikit dan 142 orang dengan tingkat kesulitan parah.

Jumlah kesulitan tertinggi yang dialami pemuda perempuan adalah kesulitan melihat yaitu sebanyak 689 orang dengan rincian 639 orang dengan tingkat kesulitan sedikit dan 50 orang dengan tingkat kesulitan parah. Jenis kesulitan lainnya yang banyak dialami oleh pemuda perempuan adalah kesulitan mengingat/berkonsentrasi (323 orang dengan tingkat kesulitan sedikit dan 231 orang dengan tingkat kesulitan parah).

Tabel 6.2
Jumlah Pemuda di Provinsi Maluku Utara yang Mempunyai Kesulitan
Fungsional menurut Jenis Kelamin, Jenis Kesulitan dan Tingkat Kesulitan,
2010

Jenis Kelamin/ Jenis Kesulitan	Tidak Ada Kesulitan	Mengalami Kesulitan		Jumlah Kol (2) s.d Kol (4)	Persentase Kesulitan
		Sedikit	Parah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
LAKI-LAKI					
Melihat	142.144	332	61	142.537	0,28
Mendengar	142.083	313	141	142.537	0,32
Berjalan atau Naik Tangga	142.174	232	131	142.537	0,25
Mengingat atau Berkonsentrasi	141.889	375	273	142.537	0,45
Mengurus Diri Sendiri	141.959	436	142	142.537	0,41
PEREMPUAN					
Melihat	140.600	639	50	141.289	0,49
Mendengar	140.940	265	84	141.289	0,25
Berjalan atau Naik Tangga	140.983	193	113	141.289	0,22
Mengingat atau Berkonsentrasi	140.735	323	231	141.289	0,39
Mengurus Diri Sendiri	140.791	393	105	141.289	0,35
LAKI-LAKI+PEREMPUAN					
Melihat	282.744	971	111	283.826	0,38
Mendengar	283.023	578	225	283.826	0,28
Berjalan atau Naik Tangga	283.157	425	244	283.826	0,24
Mengingat atau Berkonsentrasi	282.624	698	504	283.826	0,42
Mengurus Diri Sendiri	282.750	829	247	283.826	0,38

LAMPIRAN KUESIONER

<http://www.bps.go.id>

I. PENGENALAN TEMPAT	
101. Provinsi	<input type="text"/>
102. Kab/Kota *	<input type="text"/>
103. Kecamatan	<input type="text"/>
104. Desa/Kelurahan *	<input type="text"/>
105. Nomor Blok Sensus	<input type="text"/>
106. Nomor Urut SLS (Sesuai SP2010-RE3)	<input type="text"/>
107. Nama Pulau	<input type="text"/>
108. Satuan Lingkungan Setempat (SLS) terkecil	5. Lingkungan 1. RT 2. RW 3. Jorong 4. Lorong 6. Banjar 7. Dusun 8. Lainnya

III. KETERANGAN PETUGAS	
301. NAMA PETUGAS	PCL
302. TANGGAL PENCACAHAN/PEMERIKSAAN	
303. TANDA TANGAN	

II. REKAPITULASI				
201.	JUMLAH BANGUNAN FISIK (Nomor unit terakhir pada halaman terakhir blok IV kol (2))	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
202.	JUMLAH BANGUNAN SENSUS (Nomor unit terakhir pada halaman terakhir blok IV kol (3))	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
203.	JUMLAH BANGUNAN SENSUS TEMPAT TINGGAL (Baris C jumlah sampai dengan halaman terakhir blok IV kol (4))	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
204.	JUMLAH BANGUNAN SENSUS CAMPURAN (Baris C jumlah sampai dengan halaman terakhir blok IV kol (5))	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
205.	JUMLAH BANGUNAN SENSUS BUKAN TEMPAT TINGGAL (Baris C jumlah sampai dengan halaman terakhir blok IV kol (6))	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
206.	JUMLAH BANGUNAN SENSUS KEGIATAN EKONOMI (Baris C jumlah sampai dengan halaman terakhir blok IV kol (7))	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
207.	JUMLAH RUMAH TANGGA BIASA (Baris C jumlah sampai dengan halaman terakhir blok IV kol (8))	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
208.	JUMLAH RUMAH TANGGA KHUSUS (Baris C jumlah sampai dengan halaman terakhir blok IV kol (10))	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
209.	JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA LAKI-LAKI (Baris C jumlah sampai dengan halaman terakhir blok IV kol (12))	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
210.	JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA PEREMPUAN (Baris C jumlah sampai dengan halaman terakhir blok IV kol (13))	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
211.	JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA LAKI-LAKI + PEREMPUAN (Baris C jumlah sampai dengan halaman terakhir blok IV kol (14))	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rekapitulasi Hasil Pencacahan Lengkap (Disisi oleh Kortim)

212.	A. JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA LAKI-LAKI (Baris C jumlah sampai dengan halaman terakhir blok IV kol (15))	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	B. JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA PEREMPUAN (Baris C jumlah sampai dengan halaman terakhir blok IV kol (16))	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	C. JUMLAH LAKI-LAKI + PEREMPUAN (Baris C jumlah sampai dengan halaman terakhir blok IV kol (17))	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

III. KETERANGAN PETUGAS	
301. NAMA PETUGAS	PCL
302. TANGGAL PENCACAHAN/PEMERIKSAAN	
303. TANDA TANGAN	

*). Coret yang tidak sesuai

III. KEMATIAN

301. Apakah ada kematian di rumah tangga ini sejak 1 Januari 2009?

1. Ya, banyaknya: 2. Tidak → ke P401

1 orang
 2 orang
 3 orang
 orang → Tambahkan daftar baru

Jika lebih dari 3 tulis di sini →

302. Siapakah nama yang meninggal?

Almarhum/Almarhumah (ALM.) →

303. Apakah jenis kelamin (ALM.)?

1. Lk 1. Lk 1. Lk
 2. Pr 2. Pr 2. Pr

304. Pada bulan dan tahun berapa (ALM.) meninggal?

Penulisan bulan: Januari=01, Februari=02, Maret=03, ..., Desember=12

Bulan Tahun Bulan Tahun Bulan Tahun
 2009 2009 2009
 2010 2010 2010

305. Berapakah umur (ALM.) ketika meninggal?

(Isikan "00" jika umur kurang dari 1 tahun. Umur meninggal harus terisi meskipun hanya perkiraan.)

tahun tahun tahun

306. LIHAT P303 dan P305
 Apakah yang meninggal perempuan berumur 10 tahun ke atas?
 Jika "Tidak", lanjutkan ke (ALM.) lain atau P401.

1. Ya 1. Ya 1. Ya
 2. Tidak 2. Tidak 2. Tidak

307. Apakah (ALM.) meninggal selama masa kehamilan atau persalinan atau 2 bulan setelah melahirkan?

1. Ya 1. Ya 1. Ya
 2. Tidak 2. Tidak 2. Tidak

Jika "Tidak", lanjutkan ke (ALM.) lain atau P401.

308. Jika P307="ya", Almarhumah meninggal selama:

1. Masa kehamilan 1. Masa kehamilan 1. Masa kehamilan
 2. Masa persalinan 2. Masa persalinan 2. Masa persalinan
 3. Masa dua bulan setelah melahirkan 3. Masa dua bulan setelah melahirkan 3. Masa dua bulan setelah melahirkan

Lanjutkan ke (ALM.) lain atau P401.

IV. KETERANGAN PERUMAHAN

401. Apakah jenis lantai terluas?

1. Keramik/marmer/granit 5. Bambu
 2. Ubin/tegel/teraso 6. Tanah
 3. Semen/bata merah 7. Lainnya
 4. Kayu/papan

402. Berapakah luas lantai tempat tinggal?

m²

403. Apakah sumber penerangan utama?

1. Listrik PLN meteran
 2. Listrik PLN tanpa meteran
 3. Listrik Non-PLN
 4. Bukan listrik

404. Apakah bahan bakar utama untuk memasak sehari-hari?

1. Listrik 5. Kayu
 2. Gas 6. Lainnya
 3. Minyak tanah 7. Tidak pakai
 4. Arang

405. Apakah sumber utama air minum?

01. Air kemasan
 02. Ledeng sampai rumah
 03. Ledeng eceran
 04. Pompa
 05. Sumur terlindung
 06. Sumur tak terlindung
 07. Mata air terlindung
 08. Mata air tak terlindung
 09. Air sungai
 10. Air hujan
 11. Lainnya

406. Apakah fasilitas tempat buang air besar?

1. Jamban sendiri
 2. Jamban bersama
 3. Jamban umum
 4. Tidak ada → ke P408

407. Apakah tempat akhir pembuangan tinja?

1. Tangki septik
 2. Tanpa tangki septik
 3. Tidak punya

408. Apakah menguasai telepon?

1. Kabel
 2. Seluler
 3. Kabel dan seluler
 4. Tidak punya

409. Apakah ada ART yang terhubung (akses) internet dalam 3 bulan terakhir?

1. Ya 2. Tidak

410. Apa status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggal ini?

1. Milik sendiri
 2. Sewa
 3. Kontrak
 4. Lainnya } STOP

411. Apakah rumah tangga memiliki bukti kepemilikan tanah tempat tinggal ini?

1. Ya 2. Tidak → STOP

412. Apa jenis bukti kepemilikan tanah tempat tinggal?

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART
 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) bukan atas nama ART
 3. Sertifikat lain (SHGB, SHP, SSRS)
 4. Lainnya (Girik, Akte Jual Beli Notaris/PPAT, dll)

RAHASIA



REPUBLIK INDONESIA

SENSUS PENDUDUK 2010

PENCACAHAN LENGKAP RUMAH TANGGA DI LOKASI KHUSUS

SP2010-C2

I. PENGENALAN TEMPAT								
Prov	Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kel	No Blok Sensus	No Urut SLS	No Bangunan Fisik	No Bangunan Sensus	No Urut Rumah Tangga
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ALAMAT :							
Nama Kepala Rumah Tangga :							

PENGANTAR

Peraturan perundang-undangan (UU Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik) mewajibkan BPS untuk menghitung penduduk yang bertempat tinggal di wilayah teritorial Indonesia dalam Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010). Semua penduduk dicakup dalam sensus dan setiap penduduk dihitung hanya sekali.

Mohon kerjasama Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi secara lengkap Daftar SP2010-C2 ini dan menyerahkan kembali kepada petugas paling lambat 31 Mei 2010. Keterangan individu responden dalam daftar ini dijamin kerahasiaannya oleh UU.

Apabila Bapak/Ibu/Saudara memerlukan bantuan dalam menjawab pertanyaan, hubungi Sekretariat SP2010, telepon 021-3506658, atau email: sp2010@bps.go.id. Untuk keterangan lebih jelas, Anda juga dapat menghubungi BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota setempat.

PETUNJUK PENGISIAN

- Satu Daftar SP2010-C2 digunakan untuk satu rumah tangga. Jika anggota rumah tangga lebih dari 8 orang, maka gunakan daftar baru sebagai tambahan.
- Isilah ALAMAT lengkap tempat tinggal dan Nama Kepala Rumah Tangga pada Blok I. PENGENALAN TEMPAT di atas. Kotak-kotak kode wilayah diisi oleh petugas. Kepala Rumah Tangga adalah salah seorang anggota rumah tangga yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga.

[Dalam uraian petunjuk berikut ini P301, P302, ..., P404 menunjukkan nomor pertanyaan 301, 302, ..., 404].

[Kode jawaban adalah angka yang terdapat di depan alternatif jawaban].

- Isilah Blok III untuk semua anggota rumah tangga (ART).
 - Terlebih dulu tulis Nomor ART (P301) dan NAMA (P302) semua ART, satu orang per kolom. Jika banyaknya ART lebih dari 8 orang, maka ART ke-9 dan seterusnya ditulis pada daftar tambahan. Kepala rumah tangga diisikan pada kolom jawaban pertama.
 - Setelah mengisi nomor dan nama semua ART, isilah keterangan satu ART sampai lengkap pada kolom jawaban P303-P314. Setelah satu ART selesai lanjutkan mengisi keterangan lengkap satu ART berikutnya. Demikian seterusnya sampai keterangan semua ART lengkap terisi.
 - Untuk ART berumur 0-4 tahun hanya berisi pada P301-P310, sedangkan P311-P314 kosong.
 - Untuk ART berumur 5-9 tahun hanya berisi pada P301-P311, sedangkan P312-314 kosong.
 - Untuk ART berumur 10 tahun ke atas berisi pada P301-P314.
 - Untuk pertanyaan pilihan ganda, pilih salah satu jawaban yang sesuai dan tulis kode jawaban pada kotak di kolom ART yang bersangkutan. Misalnya pada P303, ART sudah tinggal di tempat sekarang selama 10 bulan, maka isikan kode 2 pada kotak jawaban.
 - Untuk pertanyaan isian, tulis jawaban pada kolom yang sesuai. Misalnya P314; *Pegawai bagian marketing pada perusahaan industri tekstil*.
 - Ikuti alur pertanyaan pada P313. Jika jawaban P313a = 1, maka langsung lanjutkan ke P314 tanpa mengisi P313b-P313d. Jika jawaban P313b = 1, maka langsung lanjutkan ke P314 tanpa mengisi P313c-P313d. Jika jawaban P313c = 1, maka langsung lanjutkan ke P315 tanpa mengisi P313d. Selesai menjawab P313d langsung lanjutkan ke P315.
- Isilah Blok IV Keterangan Perumahan, P401-P404, sesuai keadaan yang sebenarnya.
- Agar tidak salah menafsirkan pertanyaan, dipersilahkan membaca beberapa konsep definisi pada halaman paling belakang.

II. KETERANGAN PETUGAS

1. NAMA PETUGAS	2. TANGGAL PENCACAHAN	3. TANDA TANGAN
.....
4. NAMA PEMERIKSA BPS KAB/KOTA	5. TANGGAL PEMERIKSAAN	6. TANDA TANGAN
.....

KONSEP DEFINISI PENTING

RUMAH TANGGA adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan (fisik atau sensus) dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.

ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang sedang berada di rumah pada waktu pendaftaran maupun yang sementara tidak berada di rumah.

LAMA BERTEMPAT TINGGAL DI SINI berarti lamanya tinggal di rumah ini atau di rumah lain yang masih di lokasi ini.

HUBUNGAN DENGAN KEPALA RUMAH TANGGA (KRT):

1. **Kepala rumah tangga** adalah salah seorang dari ART yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.
2. **Istri/suami** adalah pasangan KRT; istri dari KRT (jika KRT laki-laki), atau suami dari KRT (jika KRT perempuan).
3. **Anak kandung** adalah anak kandung dari KRT.
4. **Anak tiri/adopsi** adalah anak tiri/anak angkat/anak adopsi dari KRT.
5. **Menantu** adalah suami/istri dari anak kandung/anak tiri/anak angkat KRT.
6. **Cucu** adalah anak dari anak kandung/anak tiri/anak angkat KRT.
7. **Orang tua/mertua** adalah bapak/ibu dari KRT atau bapak/ibu dari pasangan KRT.
8. **Famili lain** adalah mereka yang ada hubungan famili dengan KRT atau dengan isteri/suami KRT, misalnya adik, kakak, bibi, paman, kakek atau nenek.
9. **Pembantu/sopir/tukang kebun** adalah orang yang dipekerjakan dengan diberi upah/gaji.
0. **Lainnya** adalah mereka yang tidak ada hubungan famili dengan KRT atau dengan isteri/suami KRT, misalnya anak kost.

UMUR dihitung dalam tahun dengan **pembulatan ke bawah** atau sama dengan umur pada saat ulang tahun yang terakhir. Keterangan umur harus terisi, meskipun dengan perkiraan terbaik.

TEMPAT LAHIR adalah provinsi dan kabupaten/kota tempat tinggal ibu ART pada saat melahirkan ART ybs. Batas wilayah administrasi yang digunakan dalam pencacahan ini adalah batas wilayah administrasi yang terbaru.

STATUS PERKAWINAN

1. **Belum kawin** adalah mereka yang belum/tidak terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan (saat mengisi daftar ini).
2. **Kawin** adalah mereka yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara) tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat dianggap sebagai suami istri.
3. **Cerai hidup** adalah mereka yang hidup berpisah sebagai suami istri karena bercerai dan belum kawin lagi pada saat pencacahan. Mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum dianggap cerai.
4. **Cerai mati** adalah mereka yang suami/istrinya telah meninggal dunia dan belum kawin lagi pada saat pencacahan.

KEGIATAN SEMINGGU YANG LALU

Seminggu yang lalu adalah 7 hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan. Misalnya pencacahan dilakukan tanggal 16 Mei 2010, maka yang dimaksud seminggu yang lalu adalah dari tanggal 9 Mei sampai dengan 15 Mei 2010.

- a. **BEKERJA** adalah kegiatan melakukan pekerjaan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan selaku pekerja/karyawan/pegawai, ataupun hasil usaha berupa sewa atau keuntungan bagi pengusaha.
- b. **MEMPUNYAI PEKERJAAN TETAP TETAPI SELAMA SEMINGGU YANG LALU SEMENTARA TIDAK BEKERJA** karena cuti, sakit, ijin/bolos, menunggu tahapan pekerjaan berikutnya atau menunggu panggilan kerja kembali. (Pertanyaan ini hanya ditanyakan kepada mereka yang seminggu yang lalu tidak bekerja).
- c. **MENCARI PEKERJAAN** adalah berusaha mendapatkan pekerjaan. Mencari pekerjaan bisa dilakukan sebelumnya asalkan seminggu yang lalu masih menunggu jawaban. (Pertanyaan mencari pekerjaan ini hanya ditanya kepada mereka yang seminggu yang lalu kegiatannya tidak bekerja, dan tidak mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja).
- d. **MEMPERSIAPKAN SUATU USAHA** adalah kegiatan dalam rangka mendirikan suatu usaha yang baru bukan pengembangan usaha yang sudah ada. Mempersiapkan suatu usaha adalah tidakannya nyata seperti sedang mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, atau mengurus surat ijin usaha dan sebagainya. Tidak termasuk mereka yang baru merencanakan, baru berniat, atau baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha. (Pertanyaan mempersiapkan suatu usaha ini hanya ditanya kepada mereka yang seminggu yang lalu kegiatannya tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan).

BLOK III. KETERANGAN			
Pertanyaan		Jawaban	Jawaban
UNTUK ART SEMUA UMUR			
301. Tuliskan nomor urut anggota rumah tangga (ART)		<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
302. Tuliskan <i>NAMA</i>			
303. Sudah berapa lama (<i>NAMA</i>) bertempat tinggal di sini? 1. Kurang dari 6 bulan 2. Enam bulan atau lebih		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
304. Apakah (<i>NAMA</i>) bermaksud untuk bertempat tinggal tetap di sini? 1. Ya 2. Tidak		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
305. Apakah (<i>NAMA</i>) memiliki tempat tinggal di tempat lain? 1. Ya 2. Tidak		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
306. Hubungan (<i>NAMA</i>) dengan kepala rumah tangga: 1. Kepala rumah tangga 4. Anak adopsi/tiri 7. Orang tua/mertua 0. Lainnya 2. Istri/suami 5. Menantu 8. Famili lain 3. Anak kandung 6. Cucu 9. Pembantu/sopir/tk kebun		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
307. Jenis kelamin (<i>NAMA</i>) 1. Laki-laki 2. Perempuan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
308. Berapa umur (<i>NAMA</i>) sekarang ?		<input type="text"/> <input type="text"/> tahun	<input type="text"/> <input type="text"/> tahun
309. Di Provinsi dan Kabupaten/Kota mana (<i>NAMA</i>) dilahirkan? <i>Kode diisi Editor</i> →		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Jika lahir di luar negeri, tulis nama negara		Nama Provinsi/Negara:	
		Nama Kabupaten/Kota:	
		*) coret yang tidak sesuai	
310. Agama (<i>NAMA</i>): 1. Islam 4. Hindu 7. Lainnya (tuliskan) 2. Kristen 5. Budha 3. Katolik 6. Khonghucu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UNTUK ART BERUMUR 5 TAHUN KE ATAS		Jika umur 0-4 → ke P315	Jika umur 0-4 → ke P315
311. Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki (<i>NAMA</i>): 0. Tdk/blm pernah sekolah 3. Tamat SLTP/MTs/sdrt 6. Tamat Dipl I/II 9. Tamat S2/S3 1. Tdk/blm tamat SD 4. Tamat SLTA/MA/sdrt 7. Tamat Dipl III/Akdm 2. Tamat SD/MI/sdrt 5. Tamat SM Kejuruan 8. Tamat Dipl IV/S1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UNTUK ART BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS		Jika umur 0-9 → ke P315	Jika umur 0-9 → ke P315
312. Status perkawinan (<i>NAMA</i>): 1. Belum kawin 3. Cerai hidup 2. Kawin 4. Cerai mati		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
313. Kegiatan (<i>NAMA</i>) seminggu yang lalu: a. Apakah bekerja atau berusaha? <i>Bekerja atau berusaha ialah melakukan kegiatan untuk memperoleh (membantu memperoleh) upah atau gaji atau laba yang dilakukan paling sedikit 1 jam.</i> b. Apakah mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja? <i>Seperti menunggu panen, cuti, sakit, dll</i> c. Apakah mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha? d. Apakah bersedia bekerja apabila ada yang menyediakan?		<input type="checkbox"/> 1. Ya → ke P314 2. Tidak <input type="checkbox"/> 1. Ya → ke P314 2. Tidak <input type="checkbox"/> 1. Ya → ke P315 2. Tidak <input type="checkbox"/> 1. Ya } ke P315 2. Tidak }	<input type="checkbox"/> 1. Ya → ke P314 2. Tidak <input type="checkbox"/> 1. Ya → ke P314 2. Tidak <input type="checkbox"/> 1. Ya → ke P315 2. Tidak <input type="checkbox"/> 1. Ya } ke P315 2. Tidak }
314. Apa lapangan usaha atau bidang pekerjaan (utama) dari tempat bekerja (<i>NAMA</i>) selama seminggu yang lalu: <i>(Tuliskan selengkap-lengkapnya, contoh: pertanian tanaman padi, sopir di perusahaan tekstil, sopir di Pemda, guru SMP Negeri, mengojek motor, dokter di Puskesmas, dsb)</i> <i>Diisi oleh responden</i> 01. Pertanian padi & palawija 08. Industri pengolahan 15. Keuangan & asuransi 02. Hortikultura 09. Listrik & gas 16. Jasa pendidikan 03. Perkebunan 10. Konstruksi 17. Jasa kesehatan 04. Perikanan 11. Perdagangan 18. Jasa kemasyarakatan, 05. Peternakan 12. Hotel & rumah makan pemerintahan & 06. Kehutanan & pertanian lainnya 13. Transportasi & pergudangan perorangan 07. Pertambangan & penggalian 14. Informasi & komunikasi 19. Lainnya		<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
315. JIKA MASIH ADA ART LAIN, LANJUTKAN KE ART BERIKUTNYA. JIKA SEMUA ART SUDAH TERISI LENGKAP, LANJUTKAN KE BLOK IV		ART berikutnya (jika ada)	ART berikutnya (jika ada)
BLOK IV. KETERANGAN			
401. Luas lantai tempat tinggal (dalam m ²)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
402. Apakah sumber penerangan utama? 1. Listrik PLN meteran 3. Listrik Non-PLN 2. Listrik PLN tanpa meteran 4. Bukan listrik		<input type="checkbox"/>	
403. Apakah fasilitas tempat buang air besar? 1. Jamban sendiri 3. Jamban umum 2. Jamban bersama 4. Tidak ada			<input type="checkbox"/>



REPUBLIK INDONESIA

SENSUS PENDUDUK 2010



PENCACAHAN PENDUDUK YANG BERTEMPAT TINGGAL TIDAK TETAP

I. PENGENALAN TEMPAT					
101. Provinsi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	107. Kelompok penduduk	1. Tunawisma 2. Awak kapal 3. Penghuni perahu 4. Penghuni LP	5. Pengungsi 6. Barak militer 7. Lainnya
102. Kab/Kota *)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	108. Jumlah penduduk yang dicacah	a. Laki-laki	<input type="text"/>
103. Kecamatan	<input type="text"/>	<input type="text"/>		b. Perempuan	<input type="text"/>
104. Desa/Kelurahan *)	<input type="text"/>	<input type="text"/>		c. Laki-laki + Perempuan	<input type="text"/>
105. Nomor Blok Sensus	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
106. Lokasi pencacahan	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

II. KETERANGAN PETUGAS				
URAIAN	PENCACAH		PENGAWAS	
	NAMA	NIP/NMS	NAMA	NIP/NMS
201. Petugas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
202. Tanggal Pencacahan/Pemeriksaan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

*) Coret yang tidak sesuai

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp.: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax.: (021) 3857046
Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsdq@bps.go.id

